

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun 2026

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PONOROGO**



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PONOROGO

Kantor Terpadu Gedung GrahaBaktiPraja

Jalan Basuki Rahmat Lantai 1 dan 2

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 yang akan datang.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten ini, diharapkan seluruh organisasi perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini masih belum sempurna, namun harapan kami program-program di bidang Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan berguna bagi kita semua.

Ponorogo, Agustus 2025

Kepala Dinas Kesehatan



Dyah Ayu Puspitaningarti, SKM.,M.Kes.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197602062002122012

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv

LAMPIRAN

RENCANA KERJA.PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar.Belakang	1
1.2	Landasan.Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	4
1.4	Sistematika.Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5	Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	61
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	64
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	64
3.3	Program dan Kegiatan	65
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	98
BAB V	PENUTUP	113

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2024 Kabupaten Ponorogo.....	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo	29
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Ponorogo	37
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Ponorogo	63
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Ponorogo	75
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
- c. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2026 ini yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2025-2029.

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2026 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2026. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2026.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2026 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Ponorogo. Digunakannya substansi sasaran dan formula indikator Renstra atau RPJMD Tahun 2025–2029 sebagai acuan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2026 didasarkan oleh alasan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas mengamanatkan struktur organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian.
- b. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja tahun 2026 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diuraikan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
- c. Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor : 624 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026.
- d. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja PD, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja PD Tahun 2026 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD pada Tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
- c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- d. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- o. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;;
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
- s. Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan;
- t. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026;
- u. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 188.4/6447/405.09/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo disusun dengan maksud untuk menyamakan tujuan dan sasaran serta memberi arah dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan program kerja kesehatan, mendukung program kerja kepala daerah selama 5 (lima) tahun yang akan datang, serta menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini dicapai dengan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pemanfaatan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta kebijakan kesehatan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo ini adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan yang disusun agar terdapat kesesuaian dan keselarasan dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.
2. Sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan jajarannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembankan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen harus dievaluasi dalam perencanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2024. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan bagi perangkat daerah. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pencapaian indikator keberhasilan suatu program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan indikator tersebut.

Alokasi anggaran dan belanja untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A	DINAS KESEHATAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	28.650.900	96
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	134.929.171.454	129.772.909.984	96
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.708.700	219.352.180	96

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.006.460	76.891.880	99
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.091.905	667.767.078	99
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.424.133	330.262.458	99
1.7	Peningkatan Pelayanan BLUD	56.437.282.013	53.621.049.445	95
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
2.8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	23.533.671.124	23.309.111.386	99
2.9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.370.234.712	61.890.200.761	95
2.11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	377.360.000	372.507.975	99
2.12	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	735.252.500	657.030.273	89
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
3.13	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3.598.127.453	1.862.100.359	56
3.14	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.914.589.649	2.853.419.949	98
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			
4.15	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	74.683.500	71.273.000	95

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.16	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	378.200.000	294.415.800	78
4.17	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	197.669.500	161.978.900	82
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
5.18	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.621.623.000	1.606.845.115	99
5.19	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	44.025.000	41.775.000	95

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis 2025-2029, dimana program dan kegiatan tertuang dalam KUA PPAS Tahun 2025. Pada Tahun 2026 alokasi dana ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kepuasan dan jangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2024 di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2024
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	a. Persentase Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program dan anggaran secara partisipatif dan tepat waktu	100%	89,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase pelaksanaan administrasi, realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan asset yang akuntabel	100%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.01	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a.1 Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	89,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0001	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai juknis	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100%	6 dok	6 dok	100%
		b) Jumlah dokumen usulan anggaran yang disusun sesuai timeline dan juknis	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100%	6 dok	6 dok	100%
		c) Jumlah dokumen hubungan kausal dan fungsional yang dikerjakan sesuai peraturan yang berlaku	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		d) Jumlah aplikasi perencanaan dan dikelola sesuai peruntukannya	17 apl	17 apl	17 apl	17 apl	100%	17 apl	17 apl	100%
0007	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a) Jumlah dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun tepat waktu	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	100%
		b) Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah yang disusun tepat waktu dan sesuai sistematika	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	100%
		c) Jumlah dokumen laporan realisasi program dan kegiatan dilaporkan tepat waktu	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100%	6 dok	6 dok	100%
		d) Jumlah dokumen laporan kinerja program kesehatan	7 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	7 dok	100%
2.02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a.2 Persentase administrasi, realisasi dan pelaporan keuangan yang dikerjakan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	95,3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b.2 Persentase administrasi asset yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan	100%	98%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
0001	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	a) Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0002	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	a) Persentase dokumen SPP/SPM yang diterbitkan sesuai pengajuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b) Persentase pengelola keuangan dan barang diberikan honorinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0008	3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	a) Jumlah dokumen laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
		b) Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan yang diterbitkan	372 dok	372 dok	372 dok	372 dok	100%	372 dok	372 dok	100%
		c) Jumlah dokumen rekonsiliasi asset tetap yang diterbitkan	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
0005	2) Pemeliharaan Mebel	a) Persentase jasa pemeliharaan mebeleur dilaksanakan sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0006	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a) Persentase jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0009	4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	a) Persentase jasa pemeliharaan gedung kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0010	5) Pemeliharaan sarana prasarana Gedung Kantor	a) Persentase jasa pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor dilaksanakan sesuai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02	2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	94,04	79,70	94,06	92,53	100%	94,04	92,25	100%
		b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	11,89	14,80	11,91	9,76	100%	11,89	9,56	100%
		c. Prevalensi balita stunting	<20%	9,33%	<20%	8,06%	100%	<20%	8%	100%
		d. Indeks Kepuasan Masyarakat	90	87,66	90	96,88	100%	90	90	100%
		e. % puskesmas terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		f. % Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	5,2%	61,29%	4,7%	50,1%	100%	5,2%	50,3%	100%
		g. CFR Covid-19	<2%	6,40%	<4%	0%	100%	<2%	0%	100%
		h. CFR HIV/AIDS	24%	8,40%	26%	6%	100%	24%	4%	100%
		i. CFR TB paru per 100.000	4,96	3,76	5,06	4,53	100%	4,96	4,5	100%
		j. Persentase Desa Bebas DBD	56%	17%	54%	15%	27%	56%	15%	27%
		k. Proporsi penderita kusta anak	0%	2,1%	0%	1%	80%	0%	0%	100%
		l. Persentase Desa UCI	99%	70,60%	98%	67%	68%	99%	99%	100%
		m. Prevalensi Hipertensi	40,02%	18,9%	40,07%	10%	25%	40,02%	40,02%	100%
		o. Prevalensi Diabetes melitus	1,98%	2,1%	2,03%	1,80%	89%	1,98%	1,98%	100%
2.01	1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/	a.1 Persentase bangunan RS Tipe D memenuhi standar	100%	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kota	b.1 Persentase bangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas yang memenuhi standar	90%	50%	85%	50%	59%	90%	52%	58%
		c.1 Persentase puskesmas memiliki IPAL sesuai dengan standar	100%	95%	100%	94%	94%	100%	100%	100%
		d.1 Persentase ketersediaan alkes sesuai dengan standar kebutuhan	50%	52%	49%	65%	100%	67%	67%	100%
		e.1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin puskesmas sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		f.1 Persentase ketersediaan BMHP puskesmas sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0002	1) Pembangunan Puskesmas	a) Persentase pembangunan puskesmas sesuai dengan rencana	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0003	2) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	a) Persentase pembangunan pustu / faskes lainnya sesuai dengan rencana	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
0007	3) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	a) Persentase pengadaan prasarana dan pendukung fasyankes sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	92%	92%	100%	100%	100%
0009	4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	a) Persentase rehab / renovasi puskesmas/ pustu sesuai dengan rencana	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0010	5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	a) Persentase rehab / renovasi rumah dinas sesuai dengan rencana	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
0014	6) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	a) Persentase pengadaan alkes sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0020	7) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	a) Persentase alkes yang terkalibrasi sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	84%	84%	100%	100%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
0023	8) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis obat, BHP, BMHP dan vaksin sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0026	9) Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	a) Persentase operasional distribusi alkes, obat, vaksin, BMHP dan makanan minuman sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
20	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	a) Persentase keluarga bermasalah kesehatan yang didampingi oleh tenaga kesehatan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.02	1.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a.2 Persentase K4	93%	78%	92%	64%	69,78%	93%	64%	69,03%
		c.2 Persentase peserta KB aktif	70%	72%	70%	70%	100%	70%	70%	100%
		d.2 Persentase pelayanan kesehatan pada balita	94%	90%	93%	97%	100%	94%	97%	100%
		e.2 Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD	88%	83,39%	87%	89%	100%	88%	89%	100%
		f.2 Persentase pelayanan kesehatan pada remaja	80%	58%	79%	71%	89,49%	80%	71%	88,38%
		g.2 Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	60%	64,91%	57%	75%	100%	60%	75%	100%
		h.2 Persentase balita wasting (gizi buruk dan kurang)	8%	8,99	8,2%	6,6	100%	8%	6,6	100%
		i.2 Persentase desa/kelurahan STBM	9%	9,4%	8%	20%	100%	9%	20%	100%
		j.2 Persentase Pos UKK dengan strata madya	8%	4,0%	6%	83%	100%	8%	83%	100%
		k.2 Persentase pelayanan kesehatan primer sesuai standar (akreditasi utama)	64,52%	22,58%	51,61%	100,00%	100%	64,52%	100,00%	100%
		l.2 Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		m.2 Persentase pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	80%	17,2%	60%	16%	27%	80%	16%	20%
		o.2 Persentase puskesmas dengan optimalisasi Pelayanan Kesehatan oleh Peserta JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		p.2 Angka kesembuhan kasus konfirmasi Covid-19	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		q.2 Angka Keberhasilan pengobatan kasus HIV/AIDS	95%	65%	95%	98%	100%	95%	98%	100%
		r.2 Success Rate pengobatan kasus TBC	90%	83,5%	90%	85%	94,44%	90%	85%	94,44%
		s.2 RFT penderita Kusta	95%	97%	95%	100%	100%	95%	100%	100%
		t.2 Persentase Desa KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		u.2 Persentase kejadian bencana dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		v.2 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95%	90,46%	95%	80%	84,44%	95%	80%	84,44%
		w.2 Persentase Cakupan Vaksinasi Covid-19	95%	62%	95%	0%	0,00%	95%	0%	0,00%
		x.2 Persentase desa/kelurahan yang bebas pasung	95%	100%	94%	100%	100%	95%	100%	100%
		y.2 Persentase penderita HT yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	38%	38%	100%	38%	38%
		z.2 Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	90%	90%	100%	90%	90%
0001	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	a) Persentase ibu hamil yang dilayani ANC Terpadu	100%	86%	100%	97%	97%	100%	97%	97%
		b) Persentase bumil komplikasi ditangani	100%	100%	100%	97%	97%	100%	97%	97%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
0014	13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	a) Persentase penduduk mendapatkan vaksin Covid-19 sesuai dengan sasaran	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!
		b) Jumlah pasien positif covid 19 yang diisolasi di shelter	0	0%	0%	0%	0%	0	0%	0%
		c) Prosentase masyarakat yang memanfaatkan JAPRIDOKTER	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0015	14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	a) Persentase bayi BBLR	4,2%	3,16%	4,4%	4%	100%	4,2%	4%	100%
		b) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c) Jumlah Bumil KEK	19,1%	16,30%	19,3%	3%	100%	19,1%	3%	100%
0016	15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	a) Persentase Puskesmas menyelenggarakan K3 Puskesmas (internal)	45%	82%	40%	82%	100%	45%	82%	100%
		b) Persentase Pos UKK yang dibina	50%	53%	45%	58%	100%	50%	58%	100%
		c) Persentase pembinaan K3 Perkantoran	45%	37%	40%	74%	100%	45%	74%	100%
		d) Persentase pengukuran kebugaran jasmani jamaah haji	85%	100%	85%	91%	100%	85%	91%	100%
		e) Persentase pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah SD (kelas 4-6)	30%	40%	25%	69%	100%	30%	70%	100%
		f) Presentase pembinaan terhadap kelompok / klub olahraga masyarakat	45%	38%	40%	77%	100%	45%	77%	100%
		g) Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan olahraga internal	40%	30%	40%	88%	100%	40%	88%	100%
0017	16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	a) Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar	80%	68%	76%	80%	100%	80%	80%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		c) Persentase rumah tangga akses air bersih memenuhi syarat	95%	75%	94%	94%	100%	95%	94%	99%
		d) Persentase TFU memenuhi syarat	67%	52%	65%	65%	100%	67%	65%	97%
		e) Persentase TPP memenuhi syarat	49%	52%	47%	74%	100%	49%	74%	100%
		f) Persentase pasien penderita penyakit berbasis lingkungan yang dikonseling di Klinik Sanitasi	10%/ 20%/ 40%	7%	40%	13,51%	34%	10%/ 20%/ 40%	13,51%	34%
0018	17) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	a) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media cetak	10 paket	9 paket	10 paket	10 paket	100%	10 paket	10 paket	100%
		b) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media elektronik	1440 kali	1446 kali	1440 kali	1440 kali	100%	1440 kali	1440 kali	100%
0019	18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	a) Persentase puskesmas yang memiliki pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	85%	3%	80%	12%	15%	85%	12%	14%
		b) Persentase sarana pengobatan tradisional yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c) Persentase kelompok asman toga yang terbentuk	80%	34%	60%	23%	38%	80%	23%	29%
		d) Persentase hatra yang memiliki STPT	35%	13%	30%	18%	60%	35%	18%	51%
0020	19) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	a) Jumlah kasus AFP pada penduduk usia < 15 tahun yang ditemukan	6	3	6	7	117%	6	7	117%
		b) Jumlah kasus bukan campak dan bukan rubella yang ditemukan	50	41	45	84	187%	50	84	168%
		c) Persentase CJH dilakukan pemeriksaan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		d) Cakupan Imunisasi Lanjutan Baduta (usia 18 sd 24 bulan)	95%	100%	95%	89%	94%	95%	89%	94%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	a) Persentase Labkesma diiberi pembinaan sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.03	1.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a.2 Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan rencana dan kebutuhan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a) Prosentase ASN bidang kesehatan yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan diklat sesuai dengan rencana dan kebutuhan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b) Persentase pejabat fungsional yang terfasilitasi untuk penerbitan PAK dan penyelenggaraan UKOM	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.04	4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90		90	96,88	108%	90	96,88	108%
2.01	1.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	a.1 Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin usaha	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
02	1) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	a) Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) diberikan rekomendasi ijin usaha	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.02.05	5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	a. Angka Kematian Ibu (AKI)	94,04	79,70	94,06	92,53	100%	94,04	92,53	100%
		b. Angka Kematian Bayi (AKB)	11,89	14,80	11,91	9,76	100%	11,89	9,76	100%
		c. Prevalensi balita stunting	<20%	9,33%	<20%	8,06%	100%	<20%	8,06%	100%
2.01	1.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a.1 Persentase rumah tangga sehat	60%	49247	59%	60%	58,06%	60%	60%	58,06%
		b.1 Persentase Posyandu PURI	80%	95,77%	78%	99%	92,59%	80%	99%	92,59%
		c.1 Persentase desa siaga strata madya	47%	100%	46%	65%	100%	47%	65%	100%
01	1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	a) Persentase rumah tangga dikaji	20%	15907	20%	25%	26%	20%	25%	26%
		b) Persentase Institusi Pendidikan yang dikaji	50%	489	50%	97%	96,5%	50%	97%	96,5%
		c) Persentase Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji	60%	79	60%	91%	89,7%	60%	91%	89,7%
		d) Persentase kader posyandu dibina	100%	5665	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		e) Persentase UKM yang diukur & dibina tingkat perkembangannya	100%	100%	100%	96%	100%	100%	96%	100%
		f) Persentase kader desa siaga yang dibina	85%	4,938	85%	100%	100%	85%	100%	100%
2.01	1.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a.1 Persentase kader mampu melaksanakan kompetensi kebidanan	100%	50%	100%	100%	100%	60%	100%	167%
01	1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	a) Persentase kegiatan pembinaan kader dilaksanakan sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	20%	100%	500%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Ponorogo termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari 21 Kecamatan, 26 Kelurahan dan 281 Desa. Secara geografis sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, sebelah Selatan dengan Kabupaten Pacitan serta sebelah Barat dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah). Kondisi geografis dengan luas wilayah Kabupaten Ponorogo memberikan peluang dan tantangan karena mempunyai dampak terhadap timbulnya masalah kesehatan yang komprehensif, oleh karena itu program/kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki tolak ukur serta indikator yang lengkap sehingga akan mudah dalam melakukan evaluasi.

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 dapat dilihat dengan membandingkan capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	94.06	92,53	100%
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	11.91	9,76	100%
3	Prevalensi Balita Stunting	<20%	8.06%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	96,88	100%
5	% Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas	4.7%	50,1%	100%
6	CFR Covid-19	< 4%	0%	100%
7	CFR HIV/AIDS	26%	6%	100%
8	CFR TB paru per 100.000 penduduk	5.06	4.53	100%
9	Persentase Desa Bebas DBD	54%	14,5%	27%
10	Proporsi penderita kusta anak per 10.000 penduduk	0%	1%	80%
11	Persentase Desa UCI	98%	67%	69%
12	Prevalensi Hipertensi	40.07%	10%	25%
13	Prevalensi Diabetes melitus	2.03%	1,8%	89%

Dari tabel capaian kinerja di atas hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan secara umum 85% sudah baik, sedangkan 15% sisanya masih menjadi tugas besar Dinas Kesehatan untuk memperbaikinya. Meskipun beberapa indikator dinilai kurang namun faktor penyebabnya diketahui sehingga bisa diupayakan untuk perbaikannya serta menjadi program prioritas tahun anggaran berikutnya. Dukungan anggaran kesehatan yang mencukupi, kerjasama lintas program dan lintas sektor serta peran serta masyarakat

diharapkan akan ada korelasi yang positif dengan meningkatnya capaian program sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal. Fokus kegiatan Tahun 2026 diarahkan untuk Pemenuhan sarana prasarana fasyankes, penurunan stunting, pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

Memberikan pelayanan bermutu bagi masyarakat merupakan tujuan pembangunan kesehatan apalagi salah satu pilar utama program Indonesia sehat adalah JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. Dengan puskesmas sebagai PPK-BLUD dimana puskesmas bisa mengelola keuangannya secara mandiri dan fleksible serta puskesmas terakreditasi, hal ini diharapkan semakin meningkatkan mutu akses puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi masyarakat, sehingga tujuan Dinas Kesehatan yaitu **meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan** dalam mendukung *Nawa Dharma Nyata 5* : “Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional” **Misi 1. Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial**, dapat tercapai sesuai dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Ponorogo

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	2025	
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	-	96,89	96,89	96,79	95	94,08	94,06	141,57	79,70	92,53	94,08	94,06	94,04	Terpenuhi
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	-	23	23	22,13	11,95	11,93	11,91	10,72	14,80	9,76	11,93	11,91	11,89	Terpenuhi
3	Prevalensi balita stunting	<20%	-	24,8%	24,8%	<20%	<20%	<20%	13,53%	9,33%	8,06%	<20%	<20%	<20%	Terpenuhi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80	82	84	89	89	90	86,26	87,66	96,88	89	90	90	Terpenuhi
5	% puskesmas terakreditasi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100%	Terpenuhi
6	% Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	60%	16%	16%	3,7%	4,2%	5%	56%	61,29%	50,10%	4,2%	4,7%	5,2%	Terpenuhi
7	CFR Covid-19	-	-	-	10%	<8%	<6%	<4%	3,63%	6,40%	0,00%	<6%	<6%	<2%	Terpenuhi
8	CFR HIV/AIDS	-	40%	17%	17%	30%	28%	26%	23%	8,4%	6,0%	28%	26%	24%	Tidak Terpenuhi
9	CFR TB paru per 100.000 pddk	-	0,92	2	2	5,26	5,16	5,06	3,87	3,76	4,53	5,16	5,06	4,96	Terpenuhi
10	Persentase Desa Bebas DBD	-	0%	10%	12%	50%	52%	54%	2,6%	17,0%	14,5%	52%	54%	56%	Tidak Terpenuhi
11	Proporsi penderita kusta anak	< 5%	-	< 5%	< 5%	0%	0%	0%	0%	2,1%	1,0%	0%	0%	0%	Terpenuhi
12	Persentase Desa UCI	85%	-	85%	85%	95%	97%	98%	98%	70,6%	67,0%	97%	98%	99%	Tidak Terpenuhi
13	Prevalensi Hipertensi	40%		30%	30%	40,17%	40,12%	40,07%	12,4%	18,9%	10,0%	40,12%	40,07%	40,02%	Tidak Terpenuhi
14	Prevalensi Diabetes melitus	2%	-	30%	30%	2,13%	2,08%	2,03%	2%	2,1%	1,8%	2,08%	2,03%	1,98%	Tidak Terpenuhi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan, serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis pada urusan kesehatan di Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak;
2. Prevalensi stunting belum mencapai target yang ditetapkan;
3. Kasus penularan, kesakitan, dan kematian akibat penyakit menular, tidak menular, serta gangguan jiwa lebih meningkat;
4. Tren peningkatan kasus kegawatdaruratan, termasuk KLB, bencana, dan kecelakaan, memerlukan penanganan khusus;
5. Distribusi dan ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan rumah sakit belum sesuai standar;
6. Sarana, prasarana, dan alat kesehatan belum sepenuhnya memenuhi standar dan kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di beberapa fasilitas kesehatan belum memenuhi standar kepuasan yang diharapkan;
8. Tingkat kepesertaan mandiri dalam Program JKN masih rendah di kalangan masyarakat.

2.3.a. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Kesehatan diukur dari tiga hal yaitu sebagai berikut :

a.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	95,01	349,86	141,57	79,70	92,53
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	11,97	11,9	10,72	14,80	9,76
3	Prevalensi balita stunting	16,9%	15,6%	13,53%	9,33%	8,06%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	81,49	86,26	87,66	96,88
5	% puskesmas terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100,0%
6	% Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	3,2%	3,2%	56%	61,29%	50,10%
7	CFR Covid-19	12%	12%	3,63%	6,40%	0,00%
8	CFR HIV/AIDS	32%	13%	23%	8,4%	6,0%
9	CFR TB paru per 100.000 pdk	5,46	6,61	3,87	3,76	4,53
10	Persentase Desa Bebas DBD	50%	1,6%	2,6%	17,0%	14,5%
11	Proporsi penderita kusta anak	0%	6%	0%	2,1%	1,0%
12	Persentase Desa UCI	89%	92%	98%	70,6%	67,0%
13	Prevalensi Hipertensi	15%	6%	12,4%	18,9%	10,0%
14	Prevalensi Diabetes melitus	86%	1,5%	2%	2,1%	1,8%

a.2. Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	89	88	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	96	94	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	97	91	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	67	92	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	0	16	72	85,69	100
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	31	29	7	78,17	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	40	31	47	75,14	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15	9	100	46,17	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	88	52	88	95,32	100
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	80	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	45	35	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	60	67	93	90,04	100

a.3. Kinerja Anggaran

NO	PROGRAM	Capaian Kinerja Anggaran (%)			
		2021	2022	2023	2024
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	67,70	91,41	93,39	95,79
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	82,78	88,21	84,31	72,65
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	87,00	91,53	88,14	81,11
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	79,00	96,91	97,71	98,98
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	90,22	93,51	96,09	95,86

2.3.b. Permasalahan dan Hambatan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu:

b.1. Faktor Internal

- 1) Pemahaman petugas terhadap regulasi, NSPK, dan pedoman program masih perlu ditingkatkan;
- 2) Kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) belum optimal;
- 3) Distribusi, pemenuhan, dan kinerja SDM kesehatan belum memenuhi standar yang ditetapkan;
- 4) Jenis, kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan belum sesuai standar;
- 5) Regulasi rekrutmen pegawai belum sejalan dengan kebutuhan riil, serta masih terdapat kendala disiplin, mutasi, dan akreditasi fasilitas kesehatan;
- 6) Kebijakan pemerintah pusat sering berubah dan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah;
- 7) Kurangnya koordinasi antar lintas program;
- 8) Banyaknya aplikasi yang harus dikerjakan namun belum terintegrasi satu sama lain sehingga menambah beban kerja

b.2. Faktor Eksternal

- 1) Pengetahuan dan pemahaman terhadap program kesehatan belum dimiliki oleh sebagian masyarakat;
- 2) Pola perilaku hidup yang mendukung paradigma sehat masih belum diterapkan oleh masyarakat;
- 3) Penderita penyakit sering mendapatkan stigma dan diskriminasi dari masyarakat;
- 4) Kepesertaan JKN mandiri belum banyak didaftarkan oleh masyarakat;
- 5) Budaya hidup sehat (Germas) masih belum dibiasakan oleh masyarakat;
- 6) Persaingan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dengan milik swasta;
- 7) Bencana alam, Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kecelakaan;
- 8) Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- 9) Kurangnya dukungan dan peran dari lintas sektor.

2.3.c. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan berkontribusi terhadap sasaran RPJMD yaitu berakhlak, produktifitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) meningkat dengan indikator sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria

(NSPK) Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Isu KHLS yang relevan dengan Dinas Kesehatan adalah :

- 1) Universal Coverage Health (UHC) belum memenuhi target 98%
- 2) Tingkat kemiskinan menyebabkan akses ke pelayanan kesehatan rendah
- 3) Sanitasi dasar belum memenuhi target

Sedangkan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- **Isu Global**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs)

- a. SDG Nomor 2: Tanpa Kelaparan
- b. SDG Nomor 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- c. SDG Nomor 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

- **Isu Nasional**

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar.

- **Isu Regional**

Rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan utama pembangunan daerah.

2.3.d. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Dinas Kesehatan dituntut untuk lebih responsif terhadap berbagai isu yang berkembang, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Isu internal umumnya berkaitan dengan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) organisasi, sedangkan isu eksternal mencakup peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) yang berasal dari faktor di luar organisasi. Untuk mengelola berbagai isu tersebut, digunakan pendekatan Analisis SWOT guna mengidentifikasi dan merumuskan strategi yang paling sesuai dengan kondisi Dinas Kesehatan. Identifikasi terhadap isu-isu tersebut dilakukan sebagai berikut:

d.1. Kekuatan (*Strength*)

- Pembiayaan program kesehatan didukung oleh sumber anggaran, antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dana pajak rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), bantuan keuangan dari provinsi, hibah, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Tenaga kesehatan diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi sebagai standar legal dan professional
- Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Unit Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah/Kelurahan (UPKD/K), Posyandu Keluarga, serta jejaring klinik yang menjangkau hingga tingkat RT/RW atau Dusun
- Program-program kesehatan telah didukung oleh regulasi dan kebijakan daerah, seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (Perbup), sebagai dasar hukumnya
- Pelaksanaan program inovatif seperti Bumil Sehat, Stunting Turun Didampingi Pendamping Keren (BESTI PREN) dan Gerakan Bersama dan Kewirausahaan dalam rangka Meningkatkan Usaha Kesehatan Sekolah Pelajar Keren (GEBRAK UKS PREN) menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan upaya kesehatan masyarakat.
- Tersedianya program Diklat, workshop, dan lokakarya untuk peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan

d.2. Kelemahan (*Weakness*)

- Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) belum optimal.
- Kualitas dan kuantitas sarana prasarana belum sesuai standar.
- Perubahan kebijakan pusat sering tidak sesuai dengan kondisi daerah.
- Pemahaman petugas terhadap regulasi dan pedoman masih rendah.
- Distribusi dan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) belum memenuhi standar.
- Rekrutmen belum selaras dengan kebutuhan riil SDM, serta adanya kendala dalam disiplin, mutasi, dan akreditasi

d.3. Peluang (*Opportunity*)

- Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap pentingnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) penanggulangan penyakit menular dan tidak menular melalui keikutsertaan pemeriksaan kesehatan gratis.
- Keterlibatan peran serta masyarakat seperti Organisasi masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh masyarakat serta kader melalui posyandu keluarga untuk peningkatan layanan kesehatan.
- Penurunan AKI/AKB, Percepatan Penurunan Stunting, dan Penguatan Puskesmas melalui Transformasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) masih menjadi program prioritas nasional.
- Potensi kolaborasi dengan sektor swasta seperti Rumah Sakit swasta, Apotek, dan Klinik.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik rutin dialokasikan untuk peningkatan pelayanan.

- Digitalisasi layanan kesehatan melalui aplikasi, dashboard, dan antrean online mendukung pemantauan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), GERMAS, serta edukasi dan perluasan akses masyarakat.

d.4. Ancaman (*Threats*)

- Tingginya risiko kejadian luar biasa (KLB), bencana alam, dan kecelakaan menuntut kesiapsiagaan sistem Kesehatan.
- Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, disertai peningkatan mortalitas akibat penyakit menular dan tidak menular.
- Masalah stunting masih menjadi tantangan utama karena membutuhkan intervensi multisektor yang kompleks.
- Dampak perubahan iklim ekstrem turut berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit berbasis lingkungan.
- Beban pelayanan kesehatan meningkat seiring dengan prevalensi penyakit menular, tidak menular, dan gangguan kesehatan jiwa.
- Rendahnya kepesertaan JKN mandiri berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

2.3.e. Rekomendasi dan Catatan Strategis

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Memperluas cakupan program inovatif seperti GERMAS, BESTI PREN, dan GEBRAK UKS PREN hingga ke tingkat dusun.
- 2) Mengintegrasikan digitalisasi dalam sistem pelayanan dasar melalui dashboard pemantauan, antrean online, dan aplikasi kesehatan.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan (DAK, DBHCHT, hibah, pajak rokok, DAU Specific Grant, DAU Block Grant, BK Provinsi dan PAD) untuk ekspansi dan peningkatan mutu layanan kesehatan.
- 4) Meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta (Rumah Sakit, apotek, klinik) dan masyarakat sipil (ormas, tokoh agama, kader).
- 5) Memperkuat kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan, workshop, dan program diklat berkelanjutan.
- 6) Mendorong regulasi daerah yang mendukung inovasi dan percepatan transformasi layanan primer.
- 7) Menjadikan Dinas Kesehatan sebagai motor penggerak transformasi sistem kesehatan daerah melalui pendekatan promotif dan preventif berbasis masyarakat

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Ponorogo telah mengakomodir semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Keselarasan program dan kegiatan hal ini nampak baik dalam jumlah maupun indikator yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Identifikasi atas rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan yang dikonsolidasikan dalam KUA dan PPAS sebagai Dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dinas Kesehatan	a. Persentase Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana yang memadai	100%	205.837.886,03	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Dinas Kesehatan	a. Persentase Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana yang memadai	100%	205.797.886,03	
			b. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program dan anggaran secara partisipatif dan tepat waktu	100%				b. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program dan anggaran secara partisipatif dan tepat waktu	100%		
			c. Persentase pelaksanaan administrasi, realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan asset yang akuntabel	100%				c. Persentase pelaksanaan administrasi, realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan asset yang akuntabel	100%		
	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a.1 Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	211.207,00	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a.1 Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	211.207,00	
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		a) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai juknis	6 dok	128.667,00	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		a) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai juknis	6 dok	128.667,00	
			b) Jumlah dokumen usulan anggaran yang disusun sesuai timeline dan juknis	6 dok				b) Jumlah dokumen usulan anggaran yang disusun sesuai timeline dan juknis	6 dok		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			c) Jumlah dokumen hubungan kausal dan fungsional yang dikerjakan sesuai peraturan yang berlaku	2 dok				c) Jumlah dokumen hubungan kausal dan fungsional yang dikerjakan sesuai peraturan yang berlaku	2 dok		
			d) Jumlah aplikasi perencanaan dan dikelola sesuai peruntukannya	17 apl				d) Jumlah aplikasi perencanaan dan dikelola sesuai peruntukannya	17 apl		
	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a) Jumlah dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun tepat waktu	3 dok	82.540,00	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		a) Jumlah dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun tepat waktu	3 dok	82.540,00	
			b) Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah yang disusun tepat waktu dan sesuai sistematika	3 dok				b) Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah yang disusun tepat waktu dan sesuai sistematika	3 dok		
			c) Jumlah dokumen laporan realisasi program dan kegiatan dilaporkan tepat waktu	6 dok				c) Jumlah dokumen laporan realisasi program dan kegiatan dilaporkan tepat waktu	6 dok		
			d) Jumlah dokumen laporan kinerja program kesehatan	7 dok				d) Jumlah dokumen laporan kinerja program kesehatan	7 dok		
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		a.2 Persentase administrasi, realisasi dan pelaporan keuangan yang dikerjakan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	148.155.794,00	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		a.2 Persentase administrasi, realisasi dan pelaporan keuangan yang dikerjakan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	148.155.794,00	
			b.2 Persentase administrasi asset yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan	100%				b.2 Persentase administrasi asset yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan	100%		
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		a) Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	100%	147.450.940,80	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		a) Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	100%	147.450.940,80	
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		a) Persentase dokumen SPP/SPM yang diterbitkan sesuai pengajuan	100%	526.553,20	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		a) Persentase dokumen SPP/SPM yang diterbitkan sesuai pengajuan	100%	526.553,20	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			b) Persentase pengelola keuangan dan barang diberikan honorinya	100%				b) Persentase pengelola keuangan dan barang diberikan honorinya	100%		
	3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		a) Jumlah dokumen laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 dok	178.300,00	3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		a) Jumlah dokumen laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 dok	178.300,00	
			b) Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan yang diterbitkan	372 dok				b) Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan yang diterbitkan	372 dok		
			c) Jumlah dokumen rekonsiliasi asset tetap yang diterbitkan	12 dok				c) Jumlah dokumen rekonsiliasi asset tetap yang diterbitkan	12 dok		
			d) Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan	372 dok				d) Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan	372 dok		
			e) Jumlah dokumen rekomendasi hibah yang diterbitkan	1 dok				e) Jumlah dokumen rekomendasi hibah yang diterbitkan	1 dok		
			f) Jumlah kerangka acuan kegiatan puskesmas yang dikaji	31 KAK				f) Jumlah kerangka acuan kegiatan puskesmas yang dikaji	31 KAK		
			g) Jumlah puskesmas yang disupervisi dalam rangka pelaksanaan kebijakan upaya kesehatan	31 Pusk				g) Jumlah puskesmas yang disupervisi dalam rangka pelaksanaan kebijakan upaya kesehatan	31 Pusk		
			h) Jumlah rancangan laporan pengelolaan keuangan yang disusun dan atau dikaji	3751 Lap				h) Jumlah rancangan laporan pengelolaan keuangan yang disusun dan atau dikaji	3751 Lap		
	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah		a.3 Persentase administrasi perkantoran dilaksanakan sesuai SOP	100%	804.160,00	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah		a.3 Persentase administrasi perkantoran dilaksanakan sesuai SOP	100%	794.160,00	
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		a) Persentase komponen listrik disediakan sesuai rencana	100%	10.000,00	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		a) Persentase komponen listrik disediakan sesuai rencana	0%	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor		a) Persentase makanan minuman disediakan sesuai kebutuhan	100%	634.160,00	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor		a) Persentase makanan minuman disediakan sesuai kebutuhan	100%	634.160,00	
			b) Persentase kegiatan Pengadaan ATK yang dikelola sesuai rencana	100%				b) Persentase kegiatan Pengadaan ATK yang dikelola sesuai rencana	100%		
								c) Persentase komponen listrik disediakan sesuai rencana			
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		a) Persentase kegiatan cetak/penggandaan yang dikelola sesuai rencana	100%	50.000,00	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		a) Persentase kegiatan cetak/penggandaan yang dikelola sesuai rencana	100%	50.000,00	
	4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		a) Persentase media cetak dan peraturan hukum disediakan sesuai kebutuhan	100%	10.000,00	4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		a) Persentase media cetak dan peraturan hukum disediakan sesuai kebutuhan	100%	10.000,00	
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		a) Persentase pegawai yang dibiayai perjalanan dinas sesuai kebutuhan	100%	100.000,00	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		a) Persentase pegawai yang dibiayai perjalanan dinas sesuai kebutuhan	100%	100.000,00	
	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		a.4 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	124.589,86	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		a.4 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	124.589,86	
	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		a. Persentase pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dilaksanakan sesuai rencana	100%	-	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		a. Persentase pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dilaksanakan sesuai rencana	100%	-	
	2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		a. Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	99.589,86	2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		a. Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	99.589,86	
	3) Pengadaan Mebel				25.000,00	3) Pengadaan Mebel				25.000,00	
	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		a.5 Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	935.600,00	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		a.5 Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	905.600,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			b.5 Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu	100%				b.5 Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu	100%		
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat		a) Persentase kegiatan administrasi kantor (surat menyurat) yang dikelola sesuai rencana	100%	30.000,00	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat		a) Persentase kegiatan administrasi kantor (surat menyurat) yang dikelola sesuai rencana	0%	-	
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		a) Persentase komponen pendukung perkantoran (telpon, air, listrik) dikelola sesuai rencana	100%	790.000,00	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		a) Persentase komponen pendukung perkantoran (telpon, air, listrik) dikelola sesuai rencana	100%	790.000,00	
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		a) Persentase jasa administrasi dikelola sesuai rencana	100%	115.600,00	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		a) Persentase jasa administrasi dikelola sesuai rencana	100%	115.600,00	
			b) Persentase jasa kebersihan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%				b) Persentase kegiatan administrasi kantor (surat menyurat) yang dikelola sesuai rencana	100%		
	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		a.6 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	970.000,00	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		a.6 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	970.000,00	
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		a) Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai rencana	100%	700.000,00	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		a) Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai rencana	100%	700.000,00	
			b) Persentase kendaraan dinas yang diurus pajaknya sesuai rencana	100%				b) Persentase kendaraan dinas yang diurus pajaknya sesuai rencana	100%		
	2) Pemeliharaan Mebelair		a) Persentase jasa pemeliharaan mebeleur dilaksanakan sesuai rencana	100%	25.000,00	2) Pemeliharaan Mebelair		a) Persentase jasa pemeliharaan mebeleur dilaksanakan sesuai rencana	100%	25.000,00	
	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		a) Persentase jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	80.000,00	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		a) Persentase jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	80.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	4) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor		a) Persentase jasa pemeliharaan gedung kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	100.000,00	4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		a) Persentase jasa pemeliharaan gedung kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	100.000,00	
	5) Pemeliharaan sarana prasarana Gedung Kantor		a) Persentase jasa pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	65.000,00	5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		a) Persentase jasa pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%	65.000,00	
	1.7 Peningkatan Pelayanan BLUD		1) Indeks Kepuasan Masyarakat wilayah puskesmas	100%	54.636.535,17	1.7 Peningkatan Pelayanan BLUD		1) Indeks Kepuasan Masyarakat wilayah puskesmas	100%	54.636.535,17	
			2) Strata Akreditasi					2) Strata Akreditasi			
			3) Persentase Nilai PKP					3) Persentase Nilai PKP			
	1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	32 Puskesmas	a) Persentase operasional BLUD dilaksankan sesuai dengan rencana	100%	54.636.535,17	1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	32 Puskesmas	a) Persentase operasional BLUD dilaksankan sesuai dengan rencana	100%	54.636.535,17	
2.	2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	a. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	95	108.401.792,29	2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	a. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	95	108.267.691,29	
			b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	11,95				b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	11,95		
			c. Prevalensi balita stunting	<20%				c. Prevalensi balita stunting	<20%		
			d. Indeks Kepuasan Masyarakat	89				d. Indeks Kepuasan Masyarakat	89		
			e. % puskesmas terakreditasi	100%				e. % puskesmas terakreditasi	100%		
			f. % Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	3,7%				f. % Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	3,7%		
			g. CFR Covid-19	<8%				g. CFR Covid-19	<8%		
			h. CFR HIV/AIDS	30%				h. CFR HIV/AIDS	30%		
			i. CFR TB paru per 100.000	5,26				i. CFR TB paru per 100.000	5,26		
			j. Persentase Desa Bebas DBD	50%				j. Persentase Desa Bebas DBD	50%		
			k. Proporsi penderita kusta anak	0%				k. Proporsi penderita kusta anak	0%		
			l. Persentase Desa UCI	95%				l. Persentase Desa UCI	95%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			m. Prevalensi Hipertensi	40,17%				m. Prevalensi Hipertensi	40,17%		
			o. Prevalensi Diabetes melitus	2,13%				o. Prevalensi Diabetes melitus	2,13%		
	1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		a.1 Persentase bangunan RS Tipe D memenuhi standar	100%	45.535.351,69	1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		a.1 Persentase bangunan RS Tipe D memenuhi standar	100%	45.401.250,69	
			b.1 Persentase bangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas yang memenuhi standar	90%				b.1 Persentase bangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas yang memenuhi standar	90%		
			c.1 Persentase puskesmas memiliki IPAL sesuai dengan standar	100%				c.1 Persentase puskesmas memiliki IPAL sesuai dengan standar	100%		
			d.1 Persentase ketersediaan alkes sesuai dengan standar kebutuhan	50%				d.1 Persentase ketersediaan alkes sesuai dengan standar kebutuhan	50%		
			e.1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin puskesmas sesuai standar	100%				e.1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin puskesmas sesuai standar	100%		
			f.1 Persentase ketersediaan BMHP puskesmas sesuai standar	100%				f.1 Persentase ketersediaan BMHP puskesmas sesuai standar	100%		
	1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana		a) Persentase standar kebutuhan bangunan RS tipe D dibangun sesuai rencana	100%	-	1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		a) Persentase standar kebutuhan bangunan RS tipe D dibangun sesuai rencana	100%	-	
	2) Pembangunan Puskesmas		a) Persentase pembangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	100%	12.951.562,99	2) Pembangunan Puskesmas		a) Persentase pembangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	100%	12.951.562,99	
	3) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		a) Persentase pembangunan pustu / faskes lainnya sesuai dengan rencana	100%	5.970.368,39	3) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		a) Persentase pembangunan pustu / faskes lainnya sesuai dengan rencana	100%	5.970.368,39	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	4) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		a) Persentase pengadaan prasarana dan pendukung fasyankes sesuai dengan rencana	100%	3.257.165,00	4) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		a) Persentase pengadaan prasarana dan pendukung fasyankes sesuai dengan rencana	100%	3.257.165,00	
	5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		a) Persentase rehab / renovasi puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	100%	621.000,00	3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		a) Persentase rehab / renovasi puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	100%	621.000,00	
	6) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		a) Persentase pengadaan alkes sesuai dengan rencana	100%	3.180.265,60	5) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		a) Persentase pengadaan alkes sesuai dengan rencana	100%	3.180.265,60	
	7) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		a) Persentase alkes yang terkalibrasi sesuai dengan rencana	100%	276.570,71	6) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		a) Persentase alkes yang terkalibrasi sesuai dengan rencana	100%	276.570,71	
	8) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis obat dan vaksin sesuai rencana	100%	19.144.318,00	7) Pengadaan Obat, Vaksin		a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis obat dan vaksin sesuai rencana	100%	19.144.318,00	
	9) Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya		a) Persentase operasional distribusi alkes, obat, vaksin, BMHP dan makanan minuman sesuai dengan rencana	100%	134.101,00	9) Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya		a) Persentase operasional distribusi alkes, obat, vaksin, BMHP dan makanan minuman sesuai dengan rencana	0%	-	
	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		a) Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100%	250.000.000,00	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		a) Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100%	-	
	1.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan		a.2 Persentase K4	93%	61.647.280,60	1.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan		a.2 Persentase K4	93%	61.647.280,60	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		c.2 Persentase peserta KB aktif	70%		UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		c.2 Persentase peserta KB aktif	70%		
			d.2 Persentase pelayanan kesehatan pada balita	94%				d.2 Persentase pelayanan kesehatan pada balita	94%		
			e.2 Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD	88%				e.2 Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD	88%		
			f.2 Persentase pelayanan kesehatan pada remaja	80%				f.2 Persentase pelayanan kesehatan pada remaja	80%		
			g.2 Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	60%				g.2 Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	60%		
			h.2 Persentase balita wasting (gizi buruk dan kurang)	8%				h.2 Persentase balita wasting (gizi buruk dan kurang)	8%		
			i.2 Persentase desa/kelurahan STBM	9%				i.2 Persentase desa/kelurahan STBM	9%		
			j.2 Persentase Pos UKK dengan strata madya	8%				j.2 Persentase Pos UKK dengan strata madya	8%		
			k.2 Persentase pelayanan kesehatan primer sesuai standar (akreditasi utama)	64,52%				k.2 Persentase pelayanan kesehatan primer sesuai standar (akreditasi)	64,52%		
			l.2 Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai	100%				l.2 Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai	100%		
			m.2 Persentase pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	80%				m.2 Persentase pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	80%		
			o.2 Persentase puskesmas dengan optimalisasi Pelayanan Kesehatan oleh	100%				o.2 Persentase puskesmas dengan optimalisasi Pelayanan Kesehatan oleh	100%		
			p.2 Angka kesembuhan kasus konfirmasi Covid-19	90%				p.2 Angka kesembuhan kasus konfirmasi Covid-19	90%		
			q.2 Angka Keberhasilan pengobatan kasus HIV/AIDS	75%				q.2 Angka Keberhasilan pengobatan kasus HIV/AIDS	75%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			r.2 Success Rate pengobatan kasus TBC	75%				r.2 Success Rate pengobatan kasus TBC	75%		
			s.2 RFT penderita Kusta	85%				s.2 RFT penderita Kusta	85%		
			t.2 Persentase Desa KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24	100%				t.2 Persentase Desa KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24	100%		
			u.2 Persentase kejadian bencana dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%				u.2 Persentase kejadian bencana dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%		
			v.2 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95%				v.2 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95%		
			w.2 Persentase Cakupan Vaksinasi Covid-19	95%				w.2 Persentase Cakupan Vaksinasi Covid-19	95%		
			x.2 Persentase desa/kelurahan yang bebas pasung	95%				x.2 Persentase desa/kelurahan yang bebas pasung	95%		
			y.2 Persentase penderita HT yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%				y.2 Persentase penderita HT yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
			z.2 Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%				z.2 Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		a) Persentase ibu hamil yang dilayani ANC Terpadu	100%	200.000,00	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		a) Persentase ibu hamil yang dilayani ANC Terpadu	100%	200.000,00	
			b) Persentase bumil komplikasi ditangani	100%				b) Persentase bumil komplikasi ditangani	100%		
	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		a) Persentase neonatus komplikasi ditangani	100%	50.000,00	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		a) Persentase neonatus komplikasi ditangani	100%	50.000,00	
			b) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	98%				b) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	98%		
			c) Persentase penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS	70%				c) Persentase penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS	70%		
	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		a) Persentase BBL yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	50.000,00	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		a) Persentase BBL yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	50.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		a) Persentase balita dipantau tumbuh kembangnya	100%	135.245,00	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		a) Persentase balita dipantau tumbuh kembangnya	100%	135.245,00	
	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		a) Persentase murid SD dilakukan penjangkaran kesehatan	100%	50.000,00	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		a) Persentase murid SD dilakukan penjangkaran kesehatan	100%	50.000,00	
	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		a) Persentase remaja yang dilakukan pemantauan kesehatannya	100%	100.000,00	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		a) Persentase remaja yang dilakukan pemantauan kesehatannya	100%	100.000,00	
	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		a) Persentase Usia mendapat skrining dan pemeriksaan kesehatan	59%	51.500,00	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		a) Persentase Usia mendapat skrining dan pemeriksaan kesehatan	59%	51.500,00	
	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes melitus		a) Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana		50.000,00	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes melitus		a) Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana		50.000,00	
	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Hipertensi		a) Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana		50.000,00	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Hipertensi		a) Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana		50.000,00	
	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		a) Insiden rate Penyakit TB paru per 100.000 penduduk	1874	292.320,00	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		a) Insiden rate Penyakit TB paru per 100.000 penduduk	1874	292.320,00	
	11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		a) Prevalensi penyakit HIV/AIDS		53.000,00	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		a) Prevalensi penyakit HIV/AIDS		53.000,00	
	12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		a) Persentase penyakit potensial KLB terpantau	100%	-	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		a) Persentase penyakit potensial KLB terpantau	100%	-	
			b) Persentase laporan ketepatan dan kelengkapan laporan SKDR	100%				b) Persentase laporan ketepatan dan kelengkapan laporan SKDR	100%		
	13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat		a) Persentase penduduk mendapatkan vaksin Covid-19 sesuai dengan sasaran	95%	-	11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat		a) Persentase penduduk mendapatkan vaksin Covid-19 sesuai dengan sasaran	95%	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana		b) Jumlah pasien positif covid 19 yang diisolasi di shelter	> 50%		Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana		b) Jumlah pasien positif covid 19 yang diisolasi di shelter	> 50%		
			c) Prosentase masyarakat yang memanfaatkan JAPRIDOKTER	1%				c) Prosentase masyarakat yang memanfaatkan JAPRIDOKTER	1%		
	14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		a) Persentase bayi BBLR	4,2%	362.850,00	12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		a) Persentase bayi BBLR	4,2%	362.850,00	
			b) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%				b) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%		
			c) Jumlah Bumil KEK	19,1%				c) Jumlah Bumil KEK	19,1%		
	15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		a) Persentase Puskesmas menyelenggarakan K3 Puskesmas (internal)	45%	217.150,00	13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		a) Persentase Puskesmas menyelenggarakan K3 Puskesmas (internal)	45%	217.150,00	
			b) Persentase Pos UKK yang dibina	50%				b) Persentase Pos UKK yang dibina	50%		
			c) Persentase pembinaan K3 Perkantoran	45%				c) Persentase pembinaan K3 Perkantoran	45%		
			d) Persentase pengukuran kebugaran jasmani jamaah haji	85%				d) Persentase pengukuran kebugaran jasmani jamaah haji	85%		
			e) Persentase pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah SD (kelas 4-6)	30%				e) Persentase pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah SD (kelas 4-6)	30%		
			f) Presentase pembinaan terhadap kelompok / klub olahraga masyarakat	45%				f) Presentase pembinaan terhadap kelompok / klub olahraga masyarakat	45%		
			g) Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan olahraga internal	40%				g) Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan olahraga internal	40%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		a) Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	80%	277.300,00	14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		a) Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	80%	277.300,00	
			c) Persentase rumah tangga akses air bersih memenuhi syarat	95%				c) Persentase rumah tangga akses air bersih memenuhi syarat	95%		
			d) Persentase TFU memenuhi syarat	67%				d) Persentase TFU memenuhi syarat	67%		
			e) Persentase TPP memenuhi syarat	49%				e) Persentase TPP memenuhi syarat	49%		
			f) Persentase pasien penderita penyakit berbasis lingkungan yang dikonseling di Klinik Sanitasi	10%/ 20%/ 40%				f) Persentase pasien penderita penyakit berbasis lingkungan yang dikonseling di Klinik Sanitasi	10%/ 20%/ 40%		
	17) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		a) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media cetak	10 paket	605.039,00	15) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		a) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media cetak	10 paket	605.039,00	
			b) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media elektronik	1440 kali				b) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media elektronik	1440 kali		
	18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		a) Persentase puskesmas yang memiliki pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	85%	138.087,03	16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		a) Persentase puskesmas yang memiliki pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	85%	138.087,03	
			b) Persentase sarana pengobatan tradisional yang dibina	100%				b) Persentase sarana pengobatan tradisional yang dibina	100%		
			c) Persentase kelompok asman toga yang terbentuk	80%				c) Persentase kelompok asman toga yang terbentuk	80%		
			d) Persentase hattra yang memiliki STPT	35%				d) Persentase hattra yang memiliki STPT	35%		
	19) Pengelolaan Surveilans Kesehatan		a) Jumlah kasus AFP pada penduduk usia < 15 tahun yang ditemukan	6	252.700,00	17) Pengelolaan Surveilans Kesehatan		a) Jumlah kasus AFP pada penduduk usia < 15 tahun yang ditemukan	6	252.700,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			b) Jumlah kasus bukan campak dan bukan rubella yang ditemukan	50				b) Jumlah kasus bukan campak dan bukan rubella yang ditemukan	50		
			c) Persentase CJH dilakukan pemeriksaan kesehatan	100%				c) Persentase CJH dilakukan pemeriksaan kesehatan	100%		
			d) Cakupan Imunisasi Lanjutan Baduta (usia 18 sd 24 bulan)	95%				d) Cakupan Imunisasi Lanjutan Baduta (usia 18 sd 24 bulan)	95%		
			e) Cakupan Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD	95%				e) Cakupan Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD	95%		
			f) Cakupan Imunisasi Campak pada anak kelas 1 SD	95%				f) Cakupan Imunisasi Campak pada anak kelas 1 SD	95%		
			g) Cakupan Imunisasi Td pada anak SD kelas 2 dan 5	95%				g) Cakupan Imunisasi Td pada anak SD kelas 2 dan 5	95%		
			h) Cakupan Imunisasi TT 5 pada WUS (15-49 th)	85%				h) Cakupan Imunisasi TT 5 pada WUS (15-49 th)	85%		
			i) Cakupan Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th)	85%				i) Cakupan Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th)	85%		
			k) Persentase Laporan KIPi Zero reporting / KIPi Non serius dikerjakan	90%				k) Persentase Laporan KIPi Zero reporting / KIPi Non serius dikerjakan	90%		
	20) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		a) Jumlah spesimen penyakit potensial KLB yang diambil dan dikirim ke laboratorium rujukan	100%	413.091,00			a) Jumlah spesimen penyakit potensial KLB yang diambil dan dikirim ke laboratorium rujukan	100%	413.091,00	
	21) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		a) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	100%	114.000,00	18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		a) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	100%	114.000,00	
			b) Persentase penderita depresi pada penduduk usia >15 tahun	50%				b) Persentase penderita depresi pada penduduk usia >15 tahun	50%		
			c) Persentase gangguan mental emosional (GME) pada penduduk usia >15 tahun yang diberikan pelayanan	50%				c) Persentase gangguan mental emosional (GME) pada penduduk usia >15 tahun yang diberikan pelayanan	50%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	22) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		a) Persentase operasional kegiatan di PMI dilaksanakan sesuai rencana	100%	-	19) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		a) Persentase operasional kegiatan di PMI dilaksanakan sesuai rencana	100%	-	
	23) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		a) Insiden rate penyakit TB paru	90%	31.603.318,50	20) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		a) Insiden rate penyakit TB paru	90%	31.603.318,50	
			b) Angka Bebas Jentik (ABJ)	95%				b) Angka Bebas Jentik (ABJ)	95%		
			c) Prevalensi penyakit Kusta	5%				c) Prevalensi penyakit Kusta	5%		
			d) Angka Kejadian Malaria (API)	1%				d) Angka Kejadian Malaria (API)	1%		
			e) Persentase penemuan dan pengobatan kasus leptospirosis	100%				e) Persentase penemuan dan pengobatan kasus leptospirosis	100%		
			f) Persentase penemuan dan pengobatan kasus filariasis	100%				f) Persentase penemuan dan pengobatan kasus filariasis	100%		
			g) Persentase penemuan dan pengobatan pneumonia balita	100%				g) Persentase penemuan dan pengobatan pneumonia balita	100%		
			h) Persentase penemuan dan pengobatan kasus diare	100%				h) Persentase penemuan dan pengobatan kasus diare	100%		
			i) Persentase Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM sesuai standar	80%				i) Persentase Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM sesuai standar	80%		
			j) Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan Posbindu PTM	95%				j) Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan Posbindu PTM	95%		
			m) Persentase obesitas pada penduduk usia lebih 18 tahun	20%				m) Persentase obesitas pada penduduk usia lebih 18 tahun	20%		
			n) Persentase wanita usia 30-50 tahun yang melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara	30%				n) Persentase wanita usia 30-50 tahun yang melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara	30%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	23) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		a) Persentase masyarakat miskin yang masuk dalam pembiayaan jaminan kesehatan daerah	100%	131.546,50	21) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		a) Persentase masyarakat miskin yang masuk dalam pembiayaan jaminan kesehatan daerah	100%	131.546,50	
			b) Jmlh puskesmas dengan indikator angka kontak dengan rating 4	31 Pusk				b) Jmlh puskesmas dengan indikator angka kontak dengan rating 4	31 Pusk		
			c) Jmlh puskesmas dengan indikator RRNS dengan rating 4	31 Pusk				c) Jmlh puskesmas dengan indikator RRNS dengan rating 4	31 Pusk		
			d) Jmlh puskesmas dengan indikator RPPT dengan rating 4	31 Pusk				d) Jmlh puskesmas dengan indikator RPPT dengan rating 4	31 Pusk		
	24) Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat		a) Persentase pemenuhan data penilaian kabupaten kota sehat menuju swasti shaba wistara	100%	300.000,00			a) Persentase pemenuhan data penilaian kabupaten kota sehat menuju swasti shaba wistara	100%	300.000,00	
	25) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		a) Persentase operasional GFK dilaksanakan sesuai rencana	100%	1.481.246,57	22) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		a) Persentase operasional GFK dilaksanakan sesuai rencana	100%	1.481.246,57	
			b) Persentase operasional LABKESDA dilaksanakan sesuai rencana	100%				b) Persentase operasional LABKESDA dilaksanakan sesuai rencana	100%		
	26) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota		a) Jumlah puskesmas yang didampingi re-akreditasi UTAMA	20 Pusk	50.000,00	23) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota		a) Jumlah puskesmas yang didampingi re-akreditasi UTAMA	20 Pusk	50.000,00	
	27) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		a) Persentase kejadian KIPI ditangani sesuai dengan laporan kejadian	100%	-			a) Persentase kejadian KIPI ditangani sesuai dengan laporan kejadian	100%	-	
	28) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		a) Jumlah penyakit potensial KLB yang dipantau	23	100.000,00	24) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		a) Jumlah penyakit potensial KLB yang dipantau	23	100.000,00	
			b) Persentase ketepatan laporan SKDR	≥95%				b) Persentase ketepatan laporan SKDR	≥95%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			c) Persentase kelengkapan laporan SKDR	≥95%				c) Persentase kelengkapan laporan SKDR	≥95%		
			d) Persentase Desa mengalami KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%				d) Persentase Desa mengalami KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%		
	29) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		a) Persentase puskesmas yang melaksanakan penugasan dari call centre PSC	100%	1.503.000,00	25) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		a) Persentase puskesmas yang melaksanakan penugasan dari call centre PSC	100%	1.503.000,00	
			b) Persentase tim krisis kesehatan puskesmas yang dibina	70%				b) Persentase tim krisis kesehatan puskesmas yang dibina	70%		
			c) Persentase tim ambulan desa siaga menjaga standar kelengkapan dan fungsi ambulan desa siaga yang dibina	100%				c) Persentase tim ambulan desa siaga menjaga standar kelengkapan dan fungsi ambulan desa siaga yang dibina	100%		
	30) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		a) Persentase suspek malaria diperiksa	100%	-			a) Persentase suspek malaria diperiksa	100%	-	
	31) Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		a) Persentase kegiatan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	653.850,00			a) Persentase kegiatan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	653.850,00	
	32) Operasional Puskesmas (BOK)		a) Persentase pelaksanaan kegiatan UKM dilaksanakan sesuai dengan RPD BOK Puskesmas	100%	22.362.037,00			a) Persentase pelaksanaan kegiatan UKM dilaksanakan sesuai dengan RPD BOK Puskesmas	100%	22.362.037,00	
	1.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		a.3 Persentase informasi publik yang dikelola sesuai peruntukannya	100%	499.540,00	1.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		a.3 Persentase informasi publik yang dikelola sesuai peruntukannya	100%	499.540,00	
	1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		a) Persentase rekomendasi surat ijin penelitian yang diterbitkan	100%	499.540,00	1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		a) Persentase rekomendasi surat ijin penelitian yang diterbitkan	100%	499.540,00	
			b) Persentase puskesmas yang didampingi SIMPUSnya	31 pusk				b) Persentase puskesmas yang didampingi SIMPUSnya	31 pusk		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			c) Persentase media publikasi yang dikelola	3 media				c) Persentase media publikasi yang dikelola	3 media		
	1.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah		a.4 Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	100%	719.620,00	1.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah		a.4 Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	100%	719.620,00	
	1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		a) Jumlah rumah sakit ditetapkan status akreditasi PARIPURNA	6 RS	50.000,00	1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		a) Jumlah rumah sakit ditetapkan status akreditasi PARIPURNA	6 RS	50.000,00	
			b) Persentase rumah sakit dengan PPGD	100%				b) Persentase rumah sakit dengan PPGD	100%		
	2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		a) Jumlah puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga dan intervensi lanjut	31 Pusk	669.620,00	2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		a) Jumlah puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga dan intervensi lanjut	31 Pusk	669.620,00	
3.	3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	8.438.561,50	3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	8.438.561,50	
	1.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah		a.1 Persentase pemenuhan SDMK sesuai dengan kebutuhan	70%	6.026.728,00	1.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah		a.1 Persentase pemenuhan SDMK sesuai dengan kebutuhan	70%	6.026.728,00	
			a.2 Persentase puskesmas dengan pemenuhan SDMK sesuai standar (9 jenis)	80%				a.2 Persentase puskesmas dengan pemenuhan SDMK sesuai standar (9 jenis)	80%		
	1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		a) Persentase perawat ponkesdes aktif	100%	6.000.000,00	1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		a) Persentase perawat ponkesdes aktif	100%	6.000.000,00	
			b) Persentase puskesmas yang memiliki tenaga dokter	100%				b) Persentase puskesmas yang memiliki tenaga dokter	100%		
	2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		a) Persentase Labkesma diiberi pembinaan sesuai dengan rencana		26.728,00			a) Persentase Labkesma diiberi pembinaan sesuai dengan rencana		26.728,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	1.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		a.2 Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan rencana dan kebutuhan	100%	2.411.833,50	1.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		a.2 Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan rencana dan kebutuhan	100%	2.411.833,50	
	1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		a) Prosentase ASN bidang kesehatan yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan diklat sesuai dengan rencana dan kebutuhan	100%	2.411.833,50	1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		a) Prosentase ASN bidang kesehatan yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan diklat sesuai dengan rencana dan kebutuhan	100%	2.411.833,50	
			b) Persentase pejabat fungsional yang terfasilitasi untuk penerbitan PAK dan penyelenggaraan UKOM	100%				b) Persentase pejabat fungsional yang terfasilitasi untuk penerbitan PAK dan penyelenggaraan UKOM	100%		
4.	4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	159.952.820,00	4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	159.952.820,00	
	1.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		a.1 Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin usaha	100%	-	1.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		a.1 Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin usaha	100%	-	
	1) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		a) Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) diberikan rekomendasi ijin usaha	100%	-	1) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		a) Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) diberikan rekomendasi ijin usaha	100%	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	1.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		a.2 Persentase cakupan SPKP dan SPPIRT yang diterbitkan	100%	159.820.000,00	1.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		a.2 Persentase cakupan SPKP dan SPPIRT yang diterbitkan	100%	159.820.000,00	
	1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut		a) Jumlah SPKP yang diterbitkan	200	159.820.000,00	1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut		a) Jumlah SPKP yang diterbitkan	200	159.820.000,00	
	Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh		b) Prosentase SPP-IRT yang diverifikasi	100%		Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah		b) Prosentase SPP-IRT yang diverifikasi	100%		
	1.3 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		a.3 Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar kesehatan	100%	132.820,00	1.3 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		a.3 Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar kesehatan	100%	132.820,00	
	1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		a) Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan	100%	132.820,00	1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		a) Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan	100%	132.820,00	
	1.4 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		a.3 Persentase PKRT yang meemenuhi standar	100%	-	1.4 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		a.3 Persentase PKRT yang meemenuhi standar	100%	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		a) Persentase PKRT yang dibina	100%	-	1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		a) Persentase PKRT yang dibina	100%	-	
5.	5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	a. Angka Kematian Ibu (AKI)	94,04	2.602.268,49	5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	a. Angka Kematian Ibu (AKI)	94,04	2.602.268,49	
			b. Angka Kematian Bayi (AKB)	11,89				b. Angka Kematian Bayi (AKB)	11,89		
			c. Prevalensi balita stunting	<20%				c. Prevalensi balita stunting	<20%		
	1.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		a.1 Persentase rumah tangga sehat	60%	2.540.618,49	1.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		a.1 Persentase rumah tangga sehat	60%	2.540.618,49	
			b.1 Persentase Posyandu PURI	80%				b.1 Persentase Posyandu PURI	80%		
			c.1 Persentase desa siaga strata madya	47%				c.1 Persentase desa siaga strata madya	47%		
	1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		a) Persentase rumah tangga dikaji	20%	2.540.618,49	1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		a) Persentase rumah tangga dikaji	20%	2.540.618,49	
			b) Persentase Institusi Pendidikan yang dikaji	50%				b) Persentase Institusi Pendidikan yang dikaji	50%		
			c) Persentase Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji	60%				c) Persentase Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji	60%		
			d) Persentase kader posyandu dibina	100%				d) Persentase kader posyandu dibina	100%		
			e) Persentase UKBM yang diukur & dibina tingkat perkembangannya	100%				e) Persentase UKBM yang diukur & dibina tingkat perkembangannya	100%		
			f) Persentase kader desa siaga yang dibina	85%				f) Persentase kader desa siaga yang dibina	85%		
	1.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1) Persentase kader mampu melaksanakan kompetensi kebidanan		61.650,00	1.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1) Persentase kader mampu melaksanakan kompetensi kebidanan		61.650,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		a) Persentase kegiatan pembinaan kader dilaksanakan sesuai rencana	100%	61.650,00	1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		a) Persentase kegiatan pembinaan kader dilaksanakan sesuai rencana	100%	61.650,00	

2.4.a. Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisa Kebutuhan

Terdapat perubahan prioritas kebutuhan program dan kegiatan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD, perubahan kebutuhan itu antara lain :

- 1) Prioritas daerah sesuai visi misi Kepala Daerah yang baru periode 2025-2029;
- 2) Penambahan belanja gaji dan tunjangan ASN dikarenakan ada penambahan CPNS dan PPPK pada Dinas Kesehatan;
- 3) Kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk puskesmas dan RSUD BLUD;
- 4) Perubahan pemenuhan pagu indikatif sehingga program dan kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
- 5) Adanya perubahan kewenangan program dan kegiatan;
- 6) Alokasi dana earmarked.

2.4.b. Penjelasan Mengenai Alasan Proses Tersebut Dilakukan

Penjelasan atas perubahan prioritas kebutuhan program dan kegiatan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut :

b.1. Prioritas daerah sesuai visi misi Kepala Daerah yang baru periode 2025-2029

Dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru otomatis terdapat perubahan visi misi dan prioritas pembangunan daerah. Untuk kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 telah ditetapkan prioritas pembangunan Bidang Kesehatan yaitu Pembangunan Rumah Sakit Tipe D, 1 keluarga 1 dokter dan kunjungan rumah tenaga kesehatan yang meliputi dokter dan perawat.

b.2. Penambahan belanja gaji dan tunjangan ASN dikarenakan ada penambahan CPNS dan PPPK pada Dinas Kesehatan;

Per 1 Juni 2025 telah diterbitkan SK CPNS untuk kesehatan sebanyak 120 orang dan per 1 Agustus 2025 terbit SK PPPK gelombang 1, sehingga hal ini menambah belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan ASN di Dinas Kesehatan yang terdiri dari 32 puskesmas, IFK, Labkesda dan 2 RSUD sebagai UOBK.

b.3. Kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk puskesmas dan RSUD BLUD;

Salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 adalah kenaikan PAD 1 Trilyun, sehingga untuk puskesmas BLUD dan RSUD target pendapatan per tahun juga mengalami kenaikan secara signifikan sesuai dengan keputusan rapat antara eksekutif dan legislatif.

b.4. Perubahan pemenuhan pagu indikatif sehingga program dan kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran;

Bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sangat tergantung dengan ketersediaan anggaran. Pada proses RKPD 2026, Dinas Kesehatan telah mengusulkan anggaran sesuai

dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta pemerintah pusat, namun kemampuan keuangan daerah terkadang tidak bisa memenuhi semua kebutuhan pada tahun RKPD, sehingga Dinas Kesehatan menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pagu indikatif.

b.5. Adanya perubahan kewenangan program dan kegiatan

Bantuan Operasional Posyandu (BOP) Kelurahan yang sebelumnya masuk kewenangan Dinas Kesehatan berubah menjadi kewenangan kelurahan masing-masing, sehingga terdapat pengalihan anggaran dari Dinas Kesehatan ke kelurahan.

b.6. Alokasi dana earmarked

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo merupakan daerah dengan kemampuan fiskal sedang, sehingga masih memerlukan bantuan dana transfer dari APBN melalui dana earmarked yaitu dana yang telah ditentukan penggunaannya dengan peraturan yang berlaku, diantaranya Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik, DBHCHT, pajak rokok dan DAU Spesifik Grant. Alokasi dana earmarked Bidang Kesehatan bersifat penugasan melalui mekanisme top down, sehingga daerah harus menyesuaikan setiap tahun anggaran berjalan.

2.4.c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

Dari hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD 2026, telah dilakukan perubahan pada beberapa sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran indikatif. Review Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) adalah proses evaluasi terhadap dokumen perencanaan awal yang berisi rancangan program dan kegiatan pembangunan daerah untuk satu tahun ke depan. Tujuan utamanya adalah memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan daerah, rencana strategis jangka menengah (RPJMD), serta ketersediaan anggaran dan sumber daya.

Proses Review Rancangan Awal RKPD Meliputi:

c.1. Evaluasi Keselarasan:

Memastikan rancangan RKPD selaras dengan RPJMD, RKP (Rencana Kerja Pemerintah), dan prioritas pembangunan daerah.

c.2. Analisis Kinerja:

Menilai capaian kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya serta mengidentifikasi isu-isu penting yang perlu ditangani.

c.3. Keterkaitan dengan SKPD:

Memastikan rancangan RKPD selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

c.4. Analisis Anggaran:

Menilai kecukupan anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai target yang ditetapkan.

c.5. Konsultasi Publik:

Melibatkan berbagai pihak terkait (instansi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya) untuk mendapatkan masukan dan memastikan partisipasi publik.

c.6. Penyempurnaan:

Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan, rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan akhir RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, memacu keikutsertaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain dalam era globalisasi, Perangkat Daerah dituntut untuk siap dan sanggup membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Program Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 telah mengakomodir usulan serta masukan masyarakat, kebutuhan pemerintah daerah dan telah sesuai dengan Program dalam Renstra Perangkat Daerah serta telah mampu mendukung capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah.

2.5.a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh

Proses usulan pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan melibatkan beberapa tahapan, mulai dari identifikasi pemangku kepentingan, pengumpulan aspirasi, hingga penyelarasan usulan dalam forum konsultasi publik. Pemangku kepentingan, seperti masyarakat, DPRD, dan lintas perangkat daerah, memiliki peran penting dalam memberikan masukan yang konstruktif untuk penyusunan Rencana Kerja yang lebih baik. Berikut adalah tahapan umum proses usulan pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan :

a.1. Identifikasi Pemangku Kepentingan:

Dinas Kesehatan mengidentifikasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan daerah, yaitu termasuk lintas perangkat daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

a. 2. Pengumpulan Aspirasi:

Dalam pengumpulan aspirasi Dinas Kesehatan melalui berbagai metode, seperti:

- **Mengikuti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan):** Forum ini melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari kelurahan/desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten/kota, untuk menampung usulan program dan kegiatan pembangunan.
- **Menyelenggarakan Forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah):** Forum ini melibatkan seluruh OPD untuk membahas dan menyelaraskan usulan program dan kegiatan yang akan masuk dalam RKPD.
- **Melalui Aplikasi SIPD :** Dinas Kesehatan melihat aspirasi yang diusulkan melalui aplikasi SIPD Perencanaan untuk kemudian melakukan verifikasi terhadap usulan yang masuk ke Dinas Kesehatan.

2.5.b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Format D terlampir

Setelah aspirasi terkumpul, Dinas Kesehatan melakukan penyelarasan usulan dengan mempertimbangkan:

- **Prioritas Pembangunan Daerah:** Usulan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan.
- **Ketersediaan Anggaran:** Usulan juga disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, baik yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) maupun sumber lain yang sah.
- **Keterpaduan Program dan Kegiatan:** Usulan program dan kegiatan dari berbagai OPD dipastikan terpadu dan tidak tumpang tindih.

Setelah penyelarasan, Dinas Kesehatan menyusun rancangan akhir Renja yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Dokumen Renja ini yang kemudian menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun perencanaan.

Dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan penyusunan Renja, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat lebih partisipatif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Dinas
 Kesehatan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	A. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
	1) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Bungkal, Sambit, Badegan, Slahung	Jumlah bangunan pustu/UPKD dibangun sesuai standar	5 Sarana	Polindes Sambilawang, Maguwan, Dayakan, Nglewan, Janti
	2) Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Ambulan Desa Siaga	Jumlah Pengadaan Ambulan Desa Siaga dilaksanakan sesuai rencana	3 unit	Desa Karanganyar, Jambon, Cekok
	B. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	1) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kecamatan Ponorogo	Jumlah alat foging disediakan sesuai dengan usulan	2 unit	Kelurahan Pakunden, Keniten
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
	A. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
	1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa / Kelurahan	Persentase posyandu keluarga ditingkatkan kualitas layanannya	1134 Posyandu	Bantuan Operasional Posyandu

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Sasaran Indikator Kementerian Kesehatan periode 2025-2029 juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau di sebut dengan 6 (enam) pilar transformasi kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Transformasi Layanan Primer - Memperkuat aktivitas promotif dan preventif, meningkatkan skrining kesehatan, dan meningkatkan kapasitas layanan primer di puskesmas, posyandu, dan kunjungan rumah.
2. Transformasi Layanan Rujukan - Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan rujukan, terutama untuk penyakit penyebab kematian tertinggi seperti jantung, stroke, kanker, dan ginjal.
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan - Memastikan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, serta meningkatkan kualitas SDM kesehatan.
4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan - Menjamin pembiayaan yang tersedia, transparan, efektif, efisien, dan berkeadilan, serta memastikan kemudahan akses layanan kesehatan.
5. Transformasi SDM Kesehatan - Mempercepat penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional, serta meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM kesehatan.
6. Transformasi Teknologi Kesehatan - Mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam layanan kesehatan, seperti rekam medis digital dan diagnosis canggih.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan **Nawa Dharma Nyata 5** : *“Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional”*; **Misi 1**, *“Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial”* menetapkan **Tujuan** yaitu ***“Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan.”***

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepuasan dan jangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
 - a. Angka Kematian Ibu (AKI)
 - b. Angka Kematian Balita (AKBa)
 - c. Prevalensi balita stunting
 - d. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
 - e. Angka keberhasilan pengobatan tuberculosi
 - f. Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)
 - g. Cakupan Imunisasi Bayi lengkap
 - h. Persentase Hipertensi dalam pengendalian
 - i. Cakupan Desa/Kelurahan yang telah menerapkan 5 Pilar STBM
 - j. Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi
 - k. Persentase sediaan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman
 - l. Cakupan Desa/Kelurahan Sehat yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Kesatu - Meningkatnya kepuasan dan jangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kepuasan dan jangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, maka dirumuskan program sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.

- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman meliputi kegiatan :
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
 - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
 - c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, meliputi kegiatan :
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
 - b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Kedua - Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik

Untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik, maka dirumuskan program sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya pemenuhan standar pelayanan publik, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - h. Peningkatan Pelayanan BLUD.

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja dibiayai dari sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni, Dana Alokasi Umum (DAU), Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (BK) Provinsi.

3.3.a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan program kegiatan bidang kesehatan meliputi :

a.1. Data Penyakit dan Kejadian Sakit

Data ini mencakup informasi tentang jenis penyakit yang umum terjadi, tingkat morbiditas (angka kesakitan) dan mortalitas (angka kematian), serta pola penyebaran penyakit di suatu wilayah.

a.2. Data Kependudukan

Data kependudukan mencakup jumlah penduduk, distribusi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi. Informasi ini penting untuk mengetahui kelompok rentan dan kebutuhan kesehatan yang spesifik, terlebih lagi pelayanan Kesehatan saat ini berbasis siklus hidup seorang manusia.

a.3. Potensi Organisasi Kesehatan

Faktor ini meliputi ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik), dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan program kesehatan.

a.4. Keadaan Lingkungan dan Geografi

Faktor lingkungan seperti sanitasi, ketersediaan air bersih, dan kondisi geografis suatu wilayah dapat mempengaruhi penyebaran penyakit dan kebutuhan kesehatan masyarakat.

a.5. Data Sarana dan Prasarana

Data ini mencakup ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana kesehatan seperti peralatan medis, obat-obatan, dan infrastruktur pendukung lainnya.

a.6. Data Dukungan Pencapaian SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bidang kesehatan perlu menjadi perhatian dalam perumusan program, seperti mengurangi angka kematian ibu dan anak, meningkatkan akses ke layanan kesehatan, dan lain-lain.

a.7. Data RPJMN Bidang Kesehatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang kesehatan memberikan arahan dan target yang perlu dicapai dalam pembangunan kesehatan nasional.

a.8. Kearifan Lokal

Memperhatikan kearifan lokal dan budaya setempat dalam penyusunan program kesehatan dapat meningkatkan efektivitas dan keberterimaan program oleh masyarakat.

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, program kegiatan bidang kesehatan dapat dirumuskan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.3.b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 memuat 5 program, 17 kegiatan dan 67 sub kegiatan dengan alokasi pagu definitif berdasarkan sumber dana sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN SUMBER DANA									
		DAK FISIK	DAK NON FISIK	DAU	DAU KHUSUS	HIBAH	PAJAK ROKOK	BK PROPINSI	DBHCHT	PAD	JUMLAH
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA										
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.000.000	-						25.000.000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			75.000.000	-						75.000.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			139.534.527.050	7.916.413.750						147.450.940.800
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			526.553.200							526.553.200
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			175.000.000	-						175.000.000
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			500.000.000							500.000.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			50.000.000	-						50.000.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			5.000.000	-						5.000.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100.000.000	-						100.000.000
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000							50.000.000
11	Pengadaan Mebelair Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000							50.000.000
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			790.000.000	-						790.000.000
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			123.900.000							123.900.000
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			637.638.503	-						637.638.503
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			50.000.000	-						50.000.000
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000.000	-						50.000.000
17	Pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor			30.000.000	-				-		30.000.000
18	Pemeliharaan mebel			25.000.000							25.000.000
G	Peningkatan Pelayanan BLUD										
19.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Babadan									1.336.553.372	1.336.553.372
19.2	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Badegan									2.445.352.000	2.445.352.000
19.3	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Balong									3.187.192.752	3.187.192.752
19.4	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bondrang									448.615.263	448.615.263

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN SUMBER DANA									
		DAK FISIK	DAK NON FISIK	DAU	DAU KHUSUS	HIBAH	PAJAK ROKOK	BK PROPINSI	DBHCHT	PAD	JUMLAH
19.5	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bungal									2.207.601.900	2.207.601.900
19.6	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jambon									2.756.460.689	2.756.460.689
19.7	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jenangan									2.430.522.756	2.430.522.756
19.8	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jetis									2.315.464.218	2.315.464.218
19.9	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kauman Baru									2.083.975.094	2.083.975.094
19.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kesugihan									829.950.542	829.950.542
19.11	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kunti									753.988.894	753.988.894
19.12	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mlarak									1.681.270.285	1.681.270.285
19.13	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Nailan									1.610.778.459	1.610.778.459
19.14	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngebel									1.402.152.927	1.402.152.927
19.15	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngrandu									1.323.658.396	1.323.658.396
19.16	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngrayun									2.743.405.000	2.743.405.000
19.17	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ponorogo Selatan									1.374.766.569	1.374.766.569
19.18	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ponorogo Utara									1.693.288.468	1.693.288.468
19.19	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudak									647.681.765	647.681.765
19.20	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pulung									2.680.163.858	2.680.163.858
19.21	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ronowijayan									1.031.438.289	1.031.438.289
19.22	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sambit									1.681.495.158	1.681.495.158
19.23	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sampung									1.205.220.859	1.205.220.859
19.24	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sawoo									3.076.610.000	3.076.610.000
19.25	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Selur									2.000.000.000	2.000.000.000
19.26	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Setono									855.683.954	855.683.954
19.27	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Siman									1.109.470.000	1.109.470.000
19.28	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Slahung									2.307.787.340	2.307.787.340
19.29	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sooko									1.374.858.333	1.374.858.333
19.30	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sukorejo									1.903.671.000	1.903.671.000
19.31	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sukosari									1.142.249.990	1.142.249.990
19.32	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Wringinanom									995.207.042	995.207.042

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN SUMBER DANA									
		DAK FISIK	DAK NON FISIK	DAU	DAU KHUSUS	HIBAH	PAJAK ROKOK	BK PROPINSI	DBHCHT	PAD	JUMLAH
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
H	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										
20	Pembangunan Rumah Sakit								12.692.815.496		12.692.815.496
21	Pembangunan Puskesmas	10.000.000.000		-	-				-		10.000.000.000
22	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	509.768.000		-	1.000.000.000				-		1.509.768.000
23	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-	2.000.000.000				-		2.000.000.000
24	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			-	100.000.000				-		100.000.000
25	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga	-		-	650.000.000						650.000.000
26	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-		-	1.842.079.850						1.842.079.850
27	Pengadaan Obat, Bahan habis Pakai, Bahan medis habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		9.635.818.000	-	3.000.000.000				5.000.000.000		17.635.818.000
28	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		-	-	300.000.000						300.000.000
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			-	-			250.000.000			250.000.000
I	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			-	100.000.000				-		100.000.000
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			-	100.000.000				-		100.000.000
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			-	100.000.000				-		100.000.000
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			-	70.000.000						70.000.000
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			-	80.000.000						80.000.000
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			-	100.000.000						100.000.000
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			-	75.000.000						75.000.000
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes melitus			-	100.000.000						100.000.000
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Hipertensi			-	100.000.000						100.000.000
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			-	100.000.000						100.000.000
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV			-	100.000.000						100.000.000
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			-	450.000.000						450.000.000
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-	150.000.000						150.000.000
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	350.000.000				-		350.000.000
44	Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat			-	350.000.000				-		350.000.000
45	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		447.039.000	-	100.000.000				-		547.039.000
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			100.000.000							100.000.000
47	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		49.700.000	-	274.200.000				-		323.900.000
48	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		53.145.999	-	-						53.145.999

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN SUMBER DANA									
		DAK FISIK	DAK NON FISIK	DAU	DAU KHUSUS	HIBAH	PAJAK ROKOK	BK PROPINSI	DBHCHT	PAD	JUMLAH
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										
P	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										
66	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		-	-	1.000.000.000		-	-			1.000.000.000
Q	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
67	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		61.650.000	-							61.650.000
	TOTAL PAGU DINAS KESEHATAN	10.509.768.000	33.601.343.000	142.897.618.753	28.507.012.000	200.000.000	29.871.520.500	4.685.315.500	17.692.815.496	54.895.959.172	322.861.352.421

3.3.c. Penjelasan Rumusan Program Dan Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Rancangan Awal RKPD.

Seperti telah dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwa terdapat perubahan prioritas kebutuhan program dan kegiatan dibandingkan dengan rancangan awal RKPD yang disebabkan oleh perubahan prioritas daerah, penambahan gaji dan tunjangan ASN, kenaikan target PAD, perubahan kewenangan perangkat daerah serta alokasi dana earmarked.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	a. Persentase Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana yang memadai	Dinkes	100%	205.586.324.029,35	APBD		100%	209.360.068.751
		b. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program dan anggaran secara partisipatif dan tepat waktu		100%				100%	
		c. Persentase pelaksanaan administrasi, realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan asset yang akuntabel		100%				100%	
2.01	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a.1 Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinkes	100%	123.645.000,00	APBD		100%	126.736.125,00
01	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun tepat waktu dan	Dinkes	6 dok	30.845.000,00	APBD		6 dok	31.616.125,00
		b) Jumlah dokumen usulan anggaran yang disusun sesuai timeline dan juknis		6 dok				6 dok	
		c) Jumlah dokumen hubungan kausal dan fungsional yang dikerjakan sesuai peraturan yang berlaku		2 dok				2 dok	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) Jumlah aplikasi perencanaan dan dikelola sesuai peruntukannya		17 apl				17 apl	
07	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a) Jumlah dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun tepat waktu	Dinkes	3 dok	92.800.000,00	APBD		3 dok	95.120.000,00
		b) Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah yang disusun tepat waktu dan sesuai sistematika		3 dok				3 dok	
		c) Jumlah dokumen laporan realisasi program dan kegiatan dilaporkan tepat waktu		6 dok				6 dok	
		d) Jumlah dokumen laporan kinerja program kesehatan		7 dok				7 dok	
2.02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a.2 Persentase administrasi, realisasi dan pelaporan keuangan yang dikerjakan sesuai peraturan perundang-undangan	Dinkes	100%	148.155.794.000,00	APBD		100%	151.859.688.850,00
		b.2 Persentase administrasi asset yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan		100%				100%	
01	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	a) Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	Dinkes	100%	147.450.940.800,00	APBD		100%	151.137.214.320,00
02	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	a) Jumlah dokumen SPP/SPM yang diterbitkan sesuai pengajuan	Dinkes	100%	526.553.200,00	APBD		100%	539.717.030,00
		b) Persentase pengelola keuangan dan barang diberikan honorinya		100%					

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	a) Jumlah dokumen laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Dinkes	2 dok	178.300.000,00	APBD		2 dok	182.757.500,00
		b) Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan yang diterbitkan		372 dok				372 dok	
		c) Jumlah dokumen rekonsiliasi asset tetap yang diterbitkan		12 dok				12 dok	
		d) Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan		372 dok				372 dok	
		e) Jumlah dokumen rekomendasi hibah yang diterbitkan		1 dok				1 dok	
		f) Jumlah kerangka acuan kegiatan puskesmas yang dikaji		31 KAK				31 KAK	
		g) Jumlah puskesmas yang disupervisi dalam rangka pelaksanaan kebijakan upaya kesehatan		31 Pusk				31 Pusk	
2.06	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	a.3 Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	Dinkes	100%	661.860.000,00	APBD		100%	678.406.500,00
04	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a) Persentase makanan minuman disediakan sesuai kebutuhan	Dinkes	100%	501.860.000,00	APBD		100%	514.406.500,00
		b) Persentase kegiatan Pengadaan ATK yang dikelola sesuai rencana		100%				100%	
		c) Persentase komponen listrik disediakan sesuai rencana		100%					
		d) Persentase alat dan bahan kebersihan disediakan sesuai kebutuhan		100%					
		e) Persentase cinderamata dan karangan bunga yang disediakan sesuai kebutuhan		100%					

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	a) Persentase kegiatan cetak/penggandaan yang dikelola sesuai rencana	Dinkes	100%	50.000.000,00	APBD		100%	51.250.000,00
06	4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	a) Persentase media cetak, iklan dan peraturan perundang-undangan disediakan sesuai	Dinkes	100%	10.000.000,00	APBD		100%	10.250.000,00
09	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a) Persentase pegawai yang dibiayai perjalanan dinasnya sesuai kebutuhan	Dinkes	100%	100.000.000,00	APBD		100%	102.500.000,00
2.07	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a.4 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Dinkes	100%	124.589.857,35	APBD		100%	127.704.603,78
11	2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai rencana	Dinkes	100%	99.589.857,35	APBD		100%	102.079.603,78
	3) Pengadaan Mebelair Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase jasa pemeliharaan mebeleur dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	25.000.000,00	APBD			25.625.000,00
2.08	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a.5 Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP b.5 Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu	Dinkes	100%	913.900.000,00	APBD		100%	936.747.500,00
02	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a) Persentase komponen pendukung perkantoran (telpon, air, listrik) dikelola sesuai rencana	Dinkes	100%	790.000.000,00	APBD		100%	809.750.000,00
04	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a) Persentase jasa administrasi dikelola sesuai rencana b) Persentase kegiatan administrasi kantor (surat menyurat) yang dikelola sesuai rencana	Dinkes Dinkes	100% 100%	123.900.000,00	APBD APBD		100% 100%	126.997.500,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a.6 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Dinkes	100%	970.000.000,00	APBD		100%	994.250.000,00
02	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a) Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	700.000.000,00	APBD		100%	717.500.000,00
		b) Persentase kendaraan dinas yang diurus pajaknya sesuai rencana		100%				100%	
05	2) Pemeliharaan Mebel	a) Persentase jasa pemeliharaan mebeleur dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	25.000.000,00	APBD		100%	25.625.000,00
06	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a) Persentase jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	80.000.000,00	APBD		100%	82.000.000,00
	4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	a) Persentase jasa pemeliharaan gedung kantor dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	100.000.000,00	APBD		100%	102.500.000,00
	5) Pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor	a) Persentase jasa pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	65.000.000,00	APBD		100%	66.625.000,00
2.10	1.7 Peningkatan Pelayanan BLUD	a.7 Indeks Kepuasan Masyarakat wilayah puskesmas	32 Puskesmas	90	54.636.535.172,00	PAD		94,04	54.636.535.172,00
		b.7 Strata Akreditasi		Paripurna				Paripurna	
		c.7 Persentase Nilai PKP		78%				78%	
01	1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Babadan	100%	1.336.553.372,00	PAD		100%	1.369.967.206,30
01	2) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Badegan	100%	2.445.352.000,00	PAD		100%	2.506.485.800,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	3) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Balong	100%	3.187.192.752,00	PAD		100%	3.266.872.570,80
01	4) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Bondrang	100%	448.615.263,00	PAD		100%	459.830.644,58
01	5) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Bungkal	100%	2.207.601.900,00	PAD		100%	2.262.791.947,50
01	6) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Jambon	100%	2.756.460.689,00	PAD		100%	2.825.372.206,23
01	7) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Jenangan	100%	2.430.522.756,00	PAD		100%	2.491.285.824,90
01	8) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Jetis	100%	2.315.464.218,00	PAD		100%	2.373.350.823,45
01	9) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Kauman	100%	2.083.975.094,00	PAD		100%	2.136.074.471,35
01	10) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Kesugihan	100%	829.950.542,00	PAD		100%	850.699.305,55
01	11) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Kunti	100%	753.988.894,00	PAD		100%	772.838.616,35
01	12) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Mlarak	100%	1.681.270.285,00	PAD		100%	1.723.302.042,13
01	13) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Nailan	100%	1.610.778.459,00	PAD		100%	1.651.047.920,48
01	14) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Ngebel	100%	1.402.152.927,00	PAD		100%	1.437.206.750,18

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	15) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Ngrandu	100%	1.323.658.396,00	PAD		100%	1.356.749.855,90
01	16) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Ngrayun	100%	4.743.405.000,00	PAD		100%	4.861.990.125,00
01	17) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Ponorogo Selatan	100%	1.374.766.569,00	PAD		100%	1.409.135.733,23
01	18) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Ponorogo Utara	100%	1.693.288.468,00	PAD		100%	1.735.620.679,70
01	19) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Pudak	100%	647.681.765,00	PAD		100%	663.873.809,13
01	20) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Pulung	100%	2.680.163.858,00	PAD		100%	2.747.167.954,45
01	21) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Ronowijayan	100%	1.031.438.289,00	PAD		100%	1.057.224.246,23
01	22) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Sambit	100%	1.681.495.158,00	PAD		100%	1.723.532.536,95
01	23) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Sampung	100%	1.205.220.859,00	PAD		100%	1.235.351.380,48
01	24) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Sawoo	100%	3.076.610.000,00	PAD		100%	3.153.525.250,00
01	25) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Setono	100%	855.683.954,00	PAD		100%	877.076.052,85
01	26) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Siman	100%	1.109.470.000,00	PAD		100%	1.137.206.750,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	27) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Slahung	100%	2.307.787.340,00	PAD		100%	2.365.482.023,50
01	28) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Sooko	100%	1.374.858.333,00	PAD		100%	1.409.229.791,33
01	29) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Sukorejo	100%	1.903.671.000,00	PAD		100%	1.951.262.775,00
01	30) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Sukosari	100%	1.142.249.990,00	PAD		100%	1.170.806.239,75
01	31) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Wringinanom	100%	995.207.042,00	PAD		100%	1.020.087.218,05
1.02.02	2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinkes	94,04	110.664.472.907,00	APBD		94,04	113.431.084.729,68
		b. Angka Kematian Bayi (AKB)		11,89				11,89	
		c. Prevalensi balita stunting		<20%				<20%	
		d. Indeks Kepuasan Masyarakat		90				90	
		e. % puskesmas terakreditasi		100%				100%	
		f. % Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		5,2%				5,2%	
		g. CFR Covid-19		<2%				<2%	
		h. CFR HIV/AIDS		24%				24%	
		i. CFR TB paru paru per 100.000		4,96				4,96	
		j. Persentase Desa Bebas DBD		56%				56%	
		k. Proporsi penderita kusta anak		0%				0%	
		l. Persentase Desa UCI		99%				100%	
		m. Prevalensi Hipertensi		40,02%				40,02%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		o. Prevalensi Diabetes melitus		1,98%				1,98%	
2.01	1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	a.1 Persentase bangunan RS Tipe D memenuhi standar	Dinkes	100%	43.988.401.496,00	APBD		100%	45.088.111.533,40
		b.1 Persentase bangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas yang memenuhi standar		90%				90%	
		c.1 Persentase puskesmas memiliki IPAL sesuai dengan standar		100%				100%	
		d.1 Persentase puskesmas dengan ketersediaan alkes memenuhi standar		50%				50%	
		e.1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin puskesmas sesuai		100%				100%	
		f.1 Persentase ketersediaan BMHP puskesmas sesuai standar		100%				100%	
02	2) Pembangunan Puskesmas	a) Persentase pembangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	20.000.000.000,00	APBD		100%	20.500.000.000,00
	3) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	a) Persentase pembangunan pustu / faskes lainnya sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	1.509.768.000,00	APBD		100%	1.547.512.200,00
	4) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	a) Persentase pengadaan prasarana dan pendukung fasyankes sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	1.500.000.000,00	APBD		100%	1.537.500.000,00
09	5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	a) Persentase rehab / renovasi puskesmas/ pustusesuai dengan rencana	Dinkes	100%	100.000.000,00	APBD		100%	102.500.000,00
13	6) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	a) Persentase rehab / renovasi rumah dinas sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	650.000.000	APBD		100%	666.250.000,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	7) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	a) Persentase pengadaan alkes sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	3.692.815.496,00	APBD		100%	3.785.135.883,40
15	8) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	a) Persentase alkes yang terkalibrasi sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	150.000.000,00	APBD		100%	153.750.000,00
	9) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis obat dan vaksin sesuai rencana	Dinkes	100%	16.135.818.000,00	APBD		100%	16.539.213.450,00
16	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	a) Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh	Dinkes	100%	250.000.000	APBD		100%	256.250.000,00
2.02	1.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a.2 Persentase K4	Dinkes	93%	65.626.071.411,00	APBD		93%	67.266.723.196,28
		c.2 Persentase peserta KB aktif		70%				70%	
		d.2 Persentase pelayanan kesehatan pada balita		94%				94%	
		e.2 Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD		88%				88%	
		f.2 Persentase pelayanan kesehatan pada remaja		80%				80%	
		g.2 Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut		60%				60%	
		h.2 Persentase balita wasting (gizi buruk dan kurang)		8%				8%	
		i.2 Persentase desa/kelurahan STBM		9%				9%	
		j.2 Persentase Pos UKK dengan strata madya		8%				8%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		k.2 Persentase pelayanan kesehatan primer sesuai		64,52%				64,52%	
		l.2 Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar		100%				100%	
		m.2 Persentase pelayanan kesehatan tradisional sesuai		80%				80%	
		n.2 Jmlh puskesmas dengan optimalisasi Pelayanan Kesehatan oleh Peserta JKN		100%				100%	
		o.2 Angka kesembuhan kasus konfirmasi Covid-19		80%				80%	
		p.2 Angka Keberhasilan pengobatan kasus HIV/AIDS		80%				80%	
		q.2 Success Rate pengobatan kasus TBC		90%				90%	
		r.2 RFT penderita Kusta		90%				90%	
		s.2 Persentase Desa KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam		100%				100%	
		t.2 Persentase kejadian bencana dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam		100%				100%	
		u.2 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap		95%				95%	
		v.2 Persentase Cakupan Vaksinasi Covid-19		95%				95%	
		w.2 Persentase desa/kelurahan yang bebas pasung		95%				95%	
		x.2 Persentase penderita HT yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		100%				100%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		y.2 Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		100%				100%	
01	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	a) Persentase ibu hamil yang dilayani ANC Terpadu	Dinkes	100%	100.000.000,00	APBD		100%	102.500.000,00
		b) Persentase bumil komplikasi ditangani		100%				100%	
02	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	a) Persentase neonatus komplikasi ditangani	Dinkes	100%	100.000.000,00	APBD		100%	102.500.000,00
		b) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan		98%				98%	
		c) Persentase penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS		70%				70%	
03	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	a) Persentase BBL yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes	100%	100.000.000,00	APBD		100%	102.500.000,00
04	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	a) Persentase balita dipantau tumbuh kembangnya	Dinkes	100%	72.000.000,00	APBD		100%	73.800.000,00
05	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	a) Persentase murid SD dilakukan penjangkauan kesehatan	Dinkes	100%	81.125.000,00	APBD		100%	83.153.125,00
06	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	a) Persentase remaja yang dilakukan pemantauan kesehatannya	Dinkes	100%	100.000.000,00	APBD		100%	102.500.000,00
07	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	a) Persentase Usila mendapat skrining dan pemeriksaan kesehatan	Dinkes	59%	75.100.000,00	APBD		59%	76.977.500,00
08	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Diabetes melitus	a) Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana	Dinkes		100.000.000,00	APBD			102.500.000,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Hipertensi	a) Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana	Dinkes		100.000.000,00	APBD			102.500.000,00
11	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	a) Insiden rate Penyakit TB paru	Dinkes		100.000.000,00	APBD			102.500.000,00
12	11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	a) Prevalensi penyakit HIV/AIDS	Dinkes		100.000.000,00	APBD			102.500.000,00
15	14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	a) Jumlah bayi BBLR	Dinkes	4,2%	489.160.000,00	APBD		4,2%	501.389.000,00
		b) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan		100%				100%	
		c) Jumlah Bumil KEK		19,1%				19,1%	
16	15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	a) Persentase Puskesmas menyelenggarakan K3 Puskesmas (internal)	Dinkes	45%	100.000.000,00	APBD		45%	102.500.000,00
		b) Persentase Pos UKK yang dibina		50%				50%	
		c) Persentase pembinaan K3 Perkantoran		45%				45%	
		d) Persentase pengukuran kebugaran jasmani jamaah haji		85%				85%	
		e) Persentase pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah SD (kelas 4-6)		30%				30%	
		f) Presentase pembinaan terhadap kelompok / klub olahraga masyarakat		45%				45%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		g) Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan olahraga internal		40%				40%	
17	16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	a) Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Dinkes	80%	250.000.000,00	APBD		80%	256.250.000,00
		c) Persentase rumah tangga akses air bersih memenuhi		95%				95%	
		d) Persentase TFU memenuhi syarat		67%				67%	
		e) Persentase TPP memenuhi syarat		49%				49%	
		f) Persentase pasien penderita penyakit berbasis lingkungan yang dikonseling di Klinik Sanitasi		10%/20%/40%				10%/20%/40%	
18	17) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	a) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media cetak	Dinkes	10 paket	547.039.000,00	APBD		10 paket	560.714.975,00
		b) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media elektronik		1440 kali				1440 kali	
19	18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	a) Persentase puskesmas yang memiliki pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	Dinkes	85%	138.087.029,00	APBD		85%	141.539.204,73
		b) Persentase sarana pengobatan tradisional yang dibina		100%				100%	
		c) Persentase kelompok asman toga yang terbentuk		80%				80%	
		d) Persentase hatra yang memiliki STPT		35%				35%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	19) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	a) Jumlah kasus AFP pada penduduk usia < 15 tahun	Dinkes	6	323.900.000,00	APBD		6	331.997.500,00
		b) Jumlah kasus bukan campak dan bukan rubella yang ditemukan		50				55	
		c) Persentase CJH dilakukan pemeriksaan kesehatan		100%				100%	
		d) Cakupan Imunisasi Lanjutan Baduta (usia 18 sd 24 bulan)		95%				95%	
		e) Cakupan Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD		95%				95%	
		f) Cakupan Imunisasi Campak pada anak kelas 1 SD		95%				95%	
		g) Cakupan Imunisasi Td pada anak SD kelas 2 dan 5		95%				95%	
		h) Cakupan Imunisasi TT 5 pada WUS (15-49 th)		85%				85%	
		i) Cakupan Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th)		90%				90%	
		j) Persentase Laporan KIPI Zero reporting / KIPI Non serius dikerjakan		100%				100%	
22	20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	a) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	Dinkes	100%	100.000.000,00	APBD		100%	102.500.000,00
		b) Persentase penderita depresi pada penduduk usia >15 tahun		50%				50%	
		c) Persentase gangguan mental emosional (GME) pada penduduk usia >15 tahun yang diberikan pelayanan		50%				50%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	22) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	a) Insiden rate penyakit TB paru	Dinkes	150 per 100.000 penduduk	31.898.338.900,00	APBD		150 per 100.000 penduduk	32.695.797.372,50
		b) Angka Bebas Jentik (ABJ)		90%				90%	
		c) Prevalensi penyakit Kusta		0,5 per 10.000 penduduk				0,5 per 10.000 penduduk	
		d) Angka Kejadian Malaria (API)		0,01 per 1000 penduduk				0,01 per 1000 penduduk	
		e) Persentase penemuan dan pengobatan kasus leptospirosis		100%				100%	
		f) Persentase penemuan dan pengobatan kasus filariasis		100%				100%	
		g) Persentase penemuan dan pengobatan pneumonia balita		90%				90%	
		h) Persentase penemuan dan pengobatan kasus diare		90%				90%	
		i) Persentase Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM sesuai standar		80%				80%	
		j) Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan Posbindu PTM		95%				95%	
		k) Persentase obesitas pada penduduk usia lebih 18 tahun		20%				20%	
		l) Persentase wanita usia 30-50 tahun yang melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara		30%				30%	
26	23) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	a) Persentase masyarakat miskin yang masuk dalam pembiayaan jaminan kesehatan daerah	Dinkes	100%	4.680.332.482,00	APBD		100%	4.797.340.794,05

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b) Jmlh puskesmas dengan indikator angka kontak dengan rating 4		31 Pusk				31 Pusk	
		c) Jmlh puskesmas dengan indikator RRNS dengan rating 4		31 Pusk				31 Pusk	
		d) Jmlh puskesmas dengan indikator RPPT dengan rating 4		31 Pusk				31 Pusk	
27	24) Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke		Dinkes		53.145.999,38	APBD			54.474.649,36
28	25) Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat	a) Persentase pemenuhan data penilaian kabupaten kota sehat menuju swasti shaba wistara	Dinkes		350.000.000,00	APBD			358.750.000,00
33	26) Puskesmas Babadan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		670.749.316,41	APBD			687.518.049,32
33	27) Puskesmas Badegan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		701.130.817,18	APBD			718.659.087,61
33	28) Puskesmas Balong (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		792.275.319,05	APBD			812.082.202,02
33	29) Puskesmas Bondrang (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		579.604.814,11	APBD			594.094.934,47
33	30) Puskesmas Bungkal (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		853.038.320,74	APBD			874.364.278,76
33	31) Puskesmas Jambon (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		792.275.319,06	APBD			812.082.202,04
33	32) Puskesmas Jenangan (BOK) + DAU	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		1.292.275.319,64	APBD			1.324.582.202,63
33	34) Puskesmas Jetis (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		761.893.818,61	APBD			780.941.164,07
33	35) Puskesmas Kauman (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		731.512.317,49	APBD			749.800.125,43
33	36) Puskesmas Kesugihan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		640.367.815,76	APBD			656.377.011,15

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	37) Puskesmas Kunti (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		579.723.199,60	APBD			594.216.279,59
33	38) Puskesmas Mlarak (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		701.130.817,22	APBD			718.659.087,65
33	39) Puskesmas Nailan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		731.512.317,49	APBD			749.800.125,43
33	40) Puskesmas Ngebel (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		640.367.815,67	APBD			656.377.011,06
33	41) Puskesmas Ngrandu (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		579.604.814,11	APBD			594.094.934,47
33	42) Puskesmas Ngrayun (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		761.893.818,09	APBD			780.941.163,54
33	43) Puskesmas Ponorogo Selatan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		640.367.815,83	APBD			656.377.011,22
33	44) Puskesmas Ponorogo Utara (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		701.130.816,85	APBD			718.659.087,27
33	45) Puskesmas Pudak (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		640.367.816,03	APBD			656.377.011,43
33	46) Puskesmas Pulung (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		731.512.317,99	APBD			749.800.125,94
33	47) Puskesmas Ronowijayan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		701.130.817,54	APBD			718.659.087,98
33	48) Puskesmas Sambit (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		670.749.315,94	APBD			687.518.048,84
33	49) Puskesmas Sampung (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		670.749.316,34	APBD			687.518.049,25
33	50) Puskesmas Sawoo (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		731.512.317,49	APBD			749.800.125,43
33	51) Puskesmas Setono (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		670.749.316,84	APBD			687.518.049,76
33	52) Puskesmas Siman (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		701.130.817,59	APBD			718.659.088,03
33	53) Puskesmas Slahung (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		701.130.817,58	APBD			718.659.088,02
33	54) Puskesmas Sooko (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		640.367.816,03	APBD			656.377.011,43
33	55) Puskesmas Sukorejo (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		853.038.320,60	APBD			874.364.278,62

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	56) Puskesmas Sukosari (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		701.130.817,54	APBD			718.659.087,98
33	57) Puskesmas Wringinanom (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		597.585.600,17	APBD			612.525.240,18
34	58) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	a) Persentase operasional GFK dilaksanakan sesuai rencana	IFK	100%	1.198.983.000,00	APBD		100%	1.228.957.575,00
		b) Persentase operasional LABKESDA dilaksanakan sesuai rencana	Labkesda	100%				100%	
37	61) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	a) Jumlah penyakit potensial KLB yang dipantau	Dinkes	23	100.000.000,00	APBD		23	102.500.000,00
		b) Persentase ketepatan laporan SKDR		≥95%				≥95%	
		c) Persentase kelengkapan laporan SKDR		≥95%				≥95%	
		d) Persentase Desa mengalami KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam		100%				100%	
38	62) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	a) Persentase puskesmas yang melaksanakan penugasan dari call centre PSC	Dinkes	100%	1.503.000.000,00	APBD		100%	1.540.575.000,00
		b) Persentase tim krisis kesehatan puskesmas yang dibina		70%				70%	
		c) Persentase tim ambulan desa siaga menjaga standar kelengkapan dan fungsi ambulan desa siaga yang dibina		100%				100%	
39	63) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	a) Prevalensi API	Dinkes		50.000.000,00	APBD			51.250.000,00
40	64) Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	a) Persentase kegiatan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	653.850.000,00	APBD		100%	670.196.250,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03	1.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	a.3 Persentase sistem informasi dikelola sesuai dengan peruntukannya	Dinkes	100%	400.000.000,00	APBD		100%	410.000.000,00
02	1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	a) Persentase rekomendasi surat ijin penelitian yang diterbitkan		100%	400.000.000,00	APBD		100%	410.000.000,00
		b) Persentase puskesmas yang didampingi SIMPUSnya		31 pus				31 pus	
		c) Persentase media publikasi yang dikelola		3 media				3 media	
2.04	1.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a.4 Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Dinkes	100%	650.000.000,00	APBD		100%	666.250.000,00
01	1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	a) Jumlah rumah sakit ditetapkan status akreditasi PARIPURNA	Dinkes	6 RS	50.000.000,00	APBD		6 RS	51.250.000,00
		b) Persentase rumah sakit dengan PPGD		100%				100%	
03	2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	a) Jumlah puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga dan intervensi lanjut	Dinkes	31 pus	600.000.000,00	APBD		31 pus	615.000.000,00
1.02.03	3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinkes	90	6.857.049.368,00	APBD		90	7.028.475.602,20
2.02	1.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	a.1 Persentase pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan	Dinkes	70%	5.626.118.368,00	APBD		70%	5.766.771.327,20
		a.2 Persentase puskesmas dengan pemenuhan SDM sesuai standar (9 jenis)		80%				80%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	a) Jumlah perawat ponkesdes aktif b) Persentase puskesmas yang memiliki tenaga dokter	Dinkes	100% 100%	5.572.662.368,00	APBD		100% 100%	5.711.978.927,20
	2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Dinkes		53.456.000,00	APBD			54.792.400,00
2.03	1.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a.2 Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan rencana dan kebutuhan	Dinkes	100%	1.230.931.000,00	APBD		100%	1.261.704.275,00
01	1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a) Prosentase ASN bidang kesehatan yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan diklat sesuai dengan rencana dan kebutuhan b) Persentase pejabat fungsional yang terfasilitasi untuk penerbitan PAK dan penyelenggaraan UKOM	Dinkes	100% 100%	1.230.931.000,00	APBD		100% 100%	1.261.704.275,00
1.02.04	4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinkes	90	289.667.000,00	APBD		90	296.908.675,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.03	1.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	a.2 Persentase cakupan SPKP dan SPPIRT yang diterbitkan	Dinkes	100%	156.820.000,00	APBD		100%	160.740.500,00
01	1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	a) Jumlah SPKP yang diterbitkan	Dinkes	200	156.820.000,00	APBD		200	160.740.500,00
		b) Prosentase SPP-IRT yang diverifikasi		100%				100%	
2.06	1.3 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	a.3 Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar kesehatan	Dinkes	100%	132.847.000,00	APBD		100%	136.168.175,00
01	1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	a) Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan	Dinkes	100%	132.847.000,00	APBD		100%	136.168.175,00
1.02.05	5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	a. Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinkes	94,04	2.050.011.999,65	APBD		94,04	2.101.262.299,64
		b. Angka Kematian Bayi (AKB)		11,89				11,89	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c. Prevalensi balita stunting		<20%				<20%	
2.01	1.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a.1 Persentase rumah tangga sehat	Dinkes	60%	1.988.361.999,65	APBD		60%	2.101.262.299,64
		b.1 Persentase Posyandu PURI		80%				80%	
		c.1 Persentase desa siaga strata madya		47%				47%	
01	1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	a) Persentase rumah tangga dikaji	Dinkes	20%	1.988.361.999,65	APBD		20%	2.038.071.049,64
		b) Persentase Institusi Pendidikan yang dikaji		50%				50%	
		c) Persentase Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji		60%				60%	
		d) Persentase kader posyandu dibina		100%				100%	
		e) Persentase UKBM yang diukur & dibina tingkat		100%				100%	
		f) Persentase kader desa siaga yang dibina		85%				85%	
	1.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dinkes		61.650.000,00	APBD			63.191.250,00
	1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	a) Persentase kegiatan pembinaan kader dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	61.650.000,00	APBD		100%	63.191.250,00
TOTAL ANGGARAN					325.447.525.304,00				332.217.800.057,30

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tema pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 adalah “Pemantapan Fungsi Pariwisata, Pembinaan Pemuda dan Olahraga melalui Organisasi Pemuda dan Karangtaruna dan Pembangunan Insfrastruktur Dasar, Penguatan dan Mitigasi Bencana serta Perencanaan Tata Ruang yang Berkualitas,” dengan prioritas bidang kesehatan adalah integrasi lintas sectoral guna mendukung percepatan transformasi social yang difokuskan pada pengentasan kemiskinan, transformasi ekonomi yang difokuskan pada sektor ekonomi basis dan transformasi tatakelola yang difokuskan pada pemerataan layanan publik.

Tujuan Renstra Dinas Kesehatan adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan sasaran perangkat daerah yaitu (1) meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; (2) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan; dan (3) menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa, perlu keterlibatan berbagai pihak untuk mewujudkannya. Dinas Kesehatan dengan dibantu Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yaitu 32 puskesmas, Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dibantu oleh posyandu keluarga serta 8 rumah sakit baik rumah sakit milik pemerintah maupun swasta selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik melalui peningkatan mutu dan akses sehingga kebutuhan masyarakat akan kesehatan terpenuhi yang digambarkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sehingga tujuan pembangunan kesehatan bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Ponorogo.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 telah melalui forum perangkat daerah serta telah mengakomodir usulan dan aspirasi masyarakat terkait dengan Kesehatan. Program, kegiatan beserta alokasi anggaran juga telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2026

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
1					DINAS KESEHATAN								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana yang memadai	100%	205.699.092.829			150.949.788.857		
						Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program dan anggaran secara partisipatif dan tepat waktu	100%						
						Persentase pelaksanaan administrasi, realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan asset yang akuntabel	100%						
1	02	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	211.207.000			123.645.000		
1	02	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai juknis	6 dokumen	128.667.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	30.845.000	Dinas Kesehatan	
						Jumlah dokumen usulan anggaran yang disusun sesuai timeline dan juknis	6 dokumen						
						Jumlah dokumen hubungan kausal dan fungsional yang dikerjakan sesuai peraturan yang berlaku	2 dokumen						
						Jumlah aplikasi perencanaan dan dikelola sesuai peruntukannya	17 aplikasi						
1	02	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun tepat waktu	3 dokumen	82.540.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	92.800.000	Dinas Kesehatan	
						Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah yang disusun tepat waktu dan sesuai sistematika	3 dokumen						
						Jumlah dokumen laporan realisasi program dan kegiatan dilaporkan tepat waktu	6 dokumen						
1	02	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi, realisasi dan pelaporan keuangan yang dikerjakan sesuai peraturan perundang-	100%	148.157.000.800	Kabupaten Ponorogo		148.155.794.000		
						Persentase administrasi asset yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan	100%						
1	02	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	100%	147.450.940.800	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	147.450.940.800	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Persentase dokumen SPP/SPM yang diterbitkan sesuai pengajuan	100%	527.760.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	526.553.200	Dinas Kesehatan
							Persentase pengelola keuangan dan barang diberikan honorinya	100%					
1	02	01	2,02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
							Jumlah dokumen laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 dokumen	178.300.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	178.300.000	Dinas Kesehatan
							Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan yang diterbitkan	372 dokumen					
							Jumlah dokumen rekonsiliasi asset tetap yang diterbitkan	12 dokumen					
							Jumlah dokumen SP3B yang diterbitkan	372 dokumen					
							Jumlah dokumen rekomendasi hibah yang diterbitkan	1 dokumen					
							Jumlah kerangka acuan kegiatan puskesmas yang dikaji	31 KAK					
							Jumlah puskesmas yang disupervisi dalam rangka pelaksanaan kebijakan upaya kesehatan	31 Puskesmas					
							Jumlah rancangan laporan pengelolaan keuangan yang disusun dan atau dikaji	3751 Laporan					
1	02	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran dilaksanakan sesuai SOP	100%	794.160.000	Kabupaten Ponorogo			661.860.000	
1	02	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Persentase komponen listrik disediakan sesuai rencana	100%	-	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	-	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Persentase makanan minuman disediakan sesuai kebutuhan	100%	634.160.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	501.860.000	Dinas Kesehatan
							Persentase kegiatan Pengadaan ATK yang dikelola sesuai rencana	100%					
1	02	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Persentase kegiatan cetak/penggandaan yang dikelola sesuai rencana	100%	50.000.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	50.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan								
							Persentase media cetak dan peraturan hukum disediakan sesuai kebutuhan	100%	10.000.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	10.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Persentase pegawai yang dibiayai perjalanan dinas sesuai kebutuhan	100%	100.000.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	100.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	72%	124.589.857				124.589.857	
1	02	01	2,07	0001	Pengadaan kendaraan								

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
						Persentase pengadaan kendaraan dinas sesuai rencana	100%	-	Kabupaten Ponorogo	-		Dinas Kesehatan	
1	02	01	2,07	0005	Pengadaan Mebelair Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	25.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2,07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	99.589.857	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	99.589.857	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	905.600.000	Kabupaten Ponorogo		913.900.000	Dinas Kesehatan	
						Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu	100%						
1	02	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Persentase kegiatan administrasi kantor (surat menyurat) yang dikelola sesuai rencana	100%	-	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	-	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Persentase komponen pendukung perkantoran (telpon, air, listrik) dikelola sesuai rencana	100%	790.000.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	790.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Persentase jasa administrasi dikelola sesuai rencana	100%	115.600.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	123.900.000	Dinas Kesehatan	
						Persentase jasa kebersihan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%						
1	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	870.000.000			970.000.000		
1	02	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai rencana	100%	700.000.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	700.000.000	Dinas Kesehatan	
						Persentase kendaraan dinas yang diurus pajaknya sesuai rencana	100%						
1	02	01	2,09	0005	Pemeliharaan Mebel								
						Persentase jasa pemeliharaan mebeleur dilaksanakan sesuai rencana	100%	25.000.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	25.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Persentase jasa pemeliharaan mebeleur dilaksanakan sesuai rencana	100%	80.000.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	80.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2,09	0009	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	-	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	100.000.000	Dinas Kesehatan	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	01	2,09	0010	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	65.000.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	65.000.000	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		54.636.535.172					
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas		54.636.535.172			54.636.535.172		
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) CFR Covid-19 CFR HIV/AIDS CFR TB paru Prevalensi balita stunting Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Desa Bebas DBD Persentase puskesmas terakreditasi Persentase Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Proporsi penderita kusta anak Prevalensi Hipertensi Persentase Desa UCI Prevalensi Diabetes melitus	11,89 94,04 <2 % 24 % 4,96 <20 % 90 56 % 100 % 5,2 % 0 % 40,02 % 91 % 1,98 %	70.316.376.795			87.652.462.906	
	1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Persentase bangunan RS Tipe D memenuhi standar	100%	31.803.364.686		-	43.088.401.496	
							Persentase bangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas yang memenuhi standar	90%					
							Persentase puskesmas memiliki IPAL sesuai dengan standar	100%					
							Persentase ketersediaan alkes sesuai dengan standar kebutuhan	50%					
							Persentase ketersediaan obat dan vaksin puskesmas sesuai standar	100%					
							Persentase ketersediaan BMHP puskesmas sesuai standar	100%					
	1	02	02	2,01	0002	Pembangunan Puskesmas							
						Persentase pembangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	100%	12.951.562.993	Kabupaten Ponorogo	DBHCHT	20.000.000.000	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2,01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	100%	6.168.868.393	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	1.509.768.000	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2,01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya							

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	100%	3.257.165.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Fisik, DAU Khusus	1.500.000.000	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						
						Persentase rehab / renovasi puskesmas/ pustusesuai dengan rencana	100%	621.000.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	100.000.000	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						
						Persentase rehab / renovasi rumah dinas sesuai dengan rencana	100%	-	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	650.000.000	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
						Persentase pengadaan alkes sesuai dengan rencana	100%	2.621.900.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Fisik, DAU Khusus	3.692.815.496	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
						Persentase alkes yang terkalibrasi sesuai dengan rencana	100%	66.784.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	150.000.000	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						
						Persentase pengadaan jumlah dan jenis obat dan vaksin sesuai rencana	100%	5.981.983.300	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	16.135.818.000	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						
						Persentase operasional distribusi alkes, obat, vaksin, BMHP dan makanan minuman sesuai dengan rencana	100%	134.101.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,01	0026	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						
						Persentase keluarga dengan masalah kesehatan yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan	100%	134.101.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	250.000.000	
	1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Persentase K4	93%	37.522.467.109		43.514.061.410	
							Persentase peserta KB aktif	70%				
							Persentase pelayanan kesehatan pada balita	94%				
							Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD	88%				
							Persentase pelayanan kesehatan pada remaja	80%				
							Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	60%				
							Persentase balita wasting (gizi buruk dan kurang)	8%				

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Persentase desa/kelurahan STBM	9%					
							Persentase Pos UKK dengan strata madya	8%					
							Persentase pelayanan kesehatan primer sesuai standar (akreditasi utama)	64,52%					
							Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	100%					
							Persentase pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	80%					
							Persentase puskesmas dengan optimalisasi Pelayanan Kesehatan oleh Peserta JKN	100%					
							Angka kesembuhan kasus konfirmasi Covid-19						
							Angka Keberhasilan pengobatan kasus HIV/AIDS						
							Success Rate pengobatan kasus TBC						
							RFT penderita Kusta						
							Persentase Desa KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%					
							Persentase kejadian bencana dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%					
							Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	95%					
							Persentase Cakupan Vaksinasi Covid-19	95%					
							Persentase desa/kelurahan yang bebas pasung	95%					
							Persentase penderita HT yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
							Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
1	02	02	2,02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Persentase ibu hamil yang dilayani ANC Terpadu	100%	200.000.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	100.000.000	Dinas Kesehatan
							Persentase bumil komplikasi ditangani	100%					
1	02	02	2,02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Persentase neonatus komplikasi ditangani	100%	50.000.000	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	100.000.000	Dinas Kesehatan
							Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	98%					
							Persentase penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS	70%					
1	02	02	2,02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Persentase BBL yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	158.500.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, Dana Alokasi Umum	100.000.000	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
							Persentase balita dipantau tumbuh kembangnya	100%	135.245.000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	72.000.000	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Persentase murid SD dilakukan penjarangan kesehatan	100%	50.000.000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	81.125.000	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
							Persentase remaja yang dilakukan pemantauan kesehatannya	100%	100.000.000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	100.000.000	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
							Persentase Usila mendapat skrening dan pemeriksaan kesehatan	59%	50.000.000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	75.100.000	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
							Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana		50.000.000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	100.000.000	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
							Persentase kegiatan pembinaan program puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana		958.839.700	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus	100.000.000	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Insiden rate Penyakit TB paru		1.109.600.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, Dana Alokasi Umum	100.000.000	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
							Prevalensi penyakit HIV/AIDS		228.000.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, Dana Alokasi Umum	100.000.000	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2,02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Persentase bayi BBLR	4,20%	292.300.000	Kabupaten Ponorogo		489.160.000	Dinas Kesehatan
							Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%					
							Jumlah Bumil KEK	19,1%					
	1	02	02	2,02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Persentase Puskesmas menyelenggarakan K3 Puskesmas (internal)	45%	100.000.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, Dana Alokasi Umum	100.000.000	Dinas Kesehatan
							Persentase Pos UKK yang dibina	50%					

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	
							Persentase pembinaan K3 Perkantoran	45%						
							Persentase pengukuran kebugaran jasmani jamaah haji	85%						
							Persentase pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah SD (kelas 4-6)	30%						
							Presentase pembinaan terhadap kelompok / klub olahraga masyarakat	45%						
							Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan olahraga internal	40%						
1	02	02	2,02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
							Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar	80%	1.193.252.880,00	Kabupaten Ponorogo	DAK Fisik, DAK Non Fisik	250.000.000	Dinas Kesehatan	
							Persentase rumah tangga akses air bersih memenuhi syarat	95%						
							Persentase TFU memenuhi syarat	67%						
							Persentase TPP memenuhi syarat	49%						
							Persentase pasien penderita penyakit berbasis lingkungan yang dikonseling di Klinik Sanitasi	10%/ 20%/ 40%						
1	02	02	2,02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
							Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media cetak	10 Paket	378.001.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	547.039.000	Dinas Kesehatan	
							Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media elektronik	1440 Kali						
1	02	02	2,02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									
							Persentase puskesmas yang memiliki pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	85%	138.087.029	Kabupaten Ponorogo	Dana Alokasi Umum	138.087.029	Dinas Kesehatan	
							Persentase sarana pengobatan tradisional yang dibina	100%						
							Persentase kelompok asman toga yang terbentuk	80%						
							Persentase hatra yang memiliki STPT	35%						
1	02	02	2,02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
							Jumlah kasus AFP pada penduduk usia < 15 tahun yang ditemukan	6	265.800.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus	323.900.000	Dinas Kesehatan	
							Jumlah kasus bukan campak dan bukan rubella yang ditemukan	50						

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	
							Persentase CJH dilakukan pemeriksaan kesehatan	100%						
							Cakupan Imunisasi Lanjutan Baduta (usia 18 sd 24 bulan)	95%						
							Cakupan Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD	95%						
							Cakupan Imunisasi Campak pada anak kelas 1 SD	95%						
							Cakupan Imunisasi Td pada anak SD kelas 2 dan 5	95%						
							Cakupan Imunisasi TT 5 pada WUS (15-49 th)	85%						
							Cakupan Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th)	85%						
							Persentase Laporan KUPI Zero reporting / KUPI Non serius dikerjakan	90%						
1	02	02	2,02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									
							Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	100%	114.000.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus	100.000.000	Dinas Kesehatan	
							Persentase penderita depresi pada penduduk usia >15 tahun	50%						
							Persentase gangguan mental emosional (GME) pada penduduk usia >15 tahun yang diberikan pelayanan	50%						
1	02	02	2,02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
							Insiden rate penyakit TB paru		2.149.114.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus	31.898.338.900	Dinas Kesehatan	
							Angka Bebas Jentik (ABJ)							
							Prevalensi penyakit Kusta	5%						
							Angka Kejadian Malaria (API)	1%						
							Persentase penemuan dan pengobatan kasus leptospirosis	100%						
							Persentase penemuan dan pengobatan kasus filariasis	100%						
							Persentase penemuan dan pengobatan pneumonia balita	100%						

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Persentase penemuan dan pengobatan kasus diare	100%					
							Persentase Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM sesuai standar	80%					
							Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan Posbindu PTM	95%					
							Persentase obesitas pada penduduk usia lebih 18 tahun	20%					
							Persentase wanita usia 30-50 tahun yang melaksanakan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara	30%					
1	02	02	2,02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Persentase masyarakat miskin yang masuk dalam pembiayaan jaminan kesehatan daerah	100%	26.921.520.500	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus, Pajak Rokok	4.680.332.482	Dinas Kesehatan
							Jmlh puskesmas dengan indikator angka kontak dengan rating 4	31 Pusk					
							Jmlh puskesmas dengan indikator RRNS dengan rating 4	31 Pusk					
							Jmlh puskesmas dengan indikator RPPT dengan rating 4	31 Pusk					
1	02	02	2,02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		8.800.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	53.145.999	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	300.000.000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	350.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2,02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Persentase operasional GFK dilaksanakan sesuai rencana	100%	737.607.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus, PAD	1.198.983.000	Dinas Kesehatan
							Persentase operasional LABKESDA dilaksanakan sesuai rencana	100%					
1	02	02	2,02	0035	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah puskesmas yang didampingi re-akreditasi UTAMA	20 Puskesmas	50.000.000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	21.662.010.001	Dinas Kesehatan

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	02	02	2,02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota							
						Jumlah puskesmas yang didampingi re-akreditasi UTAMA	20 Puskesmas	50.000.000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	50.000.000	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2,02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	6.200.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2,02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							
						Jumlah penyakit potensial KLB yang dipantau	23	100.000.000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	100.000.000	Dinas Kesehatan	
						Persentase ketepatan laporan SKDR	≥95%						
						Persentase kelengkapan laporan SKDR	≥95%						
						Persentase Desa mengalami KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam	100%						
	1	02	02	2,02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							
						Persentase puskesmas yang melaksanakan penugasan dari call centre PSC	100%	1.500.000.000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	1.503.000.000	Dinas Kesehatan	
						Persentase tim krisis kesehatan puskesmas yang dibina	70%						
						Persentase tim ambulan desa siaga menjaga standar kelengkapan dan fungsi ambulan desa siaga yang dibina	100%						
	1	02	02	2,02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
						Prevalensi API		12.000.000	Kabupaten	DAK Non Fisik	50.000.000	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2,02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
						Persentase kegiatan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	165.600.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	653.850.000	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase sistem informasi dikelola sesuai dengan peruntukannya	100%	350.000.000		400.000.000,00	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2,03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
						Persentase rekomendasi surat ijin penelitian yang diterbitkan	100%	350.000.000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	400.000.000	Dinas Kesehatan	
						Persentase puskesmas yang didampingi SIMPUSnya	31 puskesmas						
						Persentase media publikasi yang dikelola	3 media						

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	100%	640.545.000			650.000.000,00	
	1	02	02	2,04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya							
							Jumlah rumah sakit ditetapkan status akreditasi PARIPURNA	6 RS	50.000.000	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus	50.000.000	Dinas Kesehatan
							Persentase rumah sakit dengan PPGD	100%					
	1	02	02	2,04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga dan intervensi lanjut	31 Puskesmas	590.545.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus	600.000.000	Dinas Kesehatan
	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	9.855.099.779			6.857.049.368,00	
	1	02	03	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SDMK sesuai dengan kebutuhan	70%	7.660.533.779			5.626.118.368,00	
							Persentase puskesmas dengan pemenuhan SDMK sesuai standar (9 jenis)	80%					
	1	02	03	2,02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							
							Persentase perawat ponkesdes aktif	100%	7.478.946.779	Kabupaten Ponorogo	DAU Khusus, BK Propinsi	5.572.662.368	Dinas Kesehatan
							Persentase puskesmas yang memiliki tenaga dokter	100%					
	1	02	03	2,02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	181.587.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	53.456.000	Dinas Kesehatan
	1	02	03	2,03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan rencana dan kebutuhan	100%	2.194.566.000			1.230.931.000,00	
	1	02	03	2,03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							Prosentase ASN bidang kesehatan yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan diklat sesuai dengan rencana dan kebutuhan	100%	2.194.566.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus	1.230.931.000	Dinas Kesehatan
							Persentase pejabat fungsional yang terfasilitasi untuk penerbitan PAK dan penyelenggaraan UKOM	100%					
	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	618.831.000			289.667.000,00	

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	02	04	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin usaha	100%	42.961.500			-	
	1	02	04	2,01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	42.961.500	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	-	Dinas Kesehatan
	1	02	04	2,03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase cakupan SPKP dan SPPIRT yang diterbitkan	100%	378.200.000			156.820.000,00	
	1	02	04	2,03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
							Jumlah SPKP yang diterbitkan	200	378.200.000	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	156.820.000	Dinas Kesehatan
							Prosentase SPP-IRT yang diverifikasi	100%					
	1	02	04	2,06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar kesehatan	100%	197.669.500			132.847.000,00	
	1	02	04	2,06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							
							Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan	100%	197.669.500	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik	132.847.000	Dinas Kesehatan
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Angka Kematian Ibu (AKI)	94,04	1.499.544.721			2.050.012.000	
							Angka Kematian Bayi (AKB)	11,89					
							Prevalensi balita stunting	<20%					
	1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Persentase rumah tangga sehat	60%	1.499.544.721	Kabupaten Ponorogo		2.050.012.000	
							Persentase Posyandu PURI	80%					
							Persentase desa siaga strata madya	47%					
	1	02	05	2,01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							
							Persentase rumah tangga dikaji	20%	1.452.368.721	Kabupaten Ponorogo	DAK Non Fisik, DAU Khusus, BK Provinsi	1.988.362.000	Dinas Kesehatan
							Persentase Institusi Pendidikan yang dikaji	50%					

No	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	
						Persentase Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji	60%						
						Persentase kader posyandu dibina	100%						
						Persentase UKBM yang diukur & dibina tingkat perkembangannya	100%						
						Persentase kader desa siaga yang dibina	85%						
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang diukur & dibina tingkat perkembangannya	100%	47.176.000			61.650.000,00		
1	02	05	2,03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
						Persentase kegiatan pembinaan kader dilaksanakan sesuai rencana	100%	47.176.000	Kabupaten Ponorogo	Dak Non Fisik	61.650.000	Dinas Kesehatan	

BAB V

PENUTUP

5.a. Catatan Penting

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Tahun 2026, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Periode 2025-2029. Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai tujuan dan sasaran, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang telah kita rencanakan menyimpang dari realisasi yang ada. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan adalah melakukan kegiatan secara terpadu antar beberapa kegiatan yang sejenis, melakukan efisiensi kegiatan yang bersifat ceremonial dan memprioritaskan kegiatan yang memberikan dampak langsung pada Masyarakat.

5.b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja suatu instansi atau perangkat daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Renja disusun dengan baik, terarah, dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Beberapa kaidah pelaksanaan Renja yang penting antara lain:

- 1) Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lebih Tinggi:
- 2) Keterkaitan dengan RKPD:
- 3) Fokus pada Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah:
- 4) Penyusunan yang Partisipatif:
- 5) Adanya Target Kinerja yang Jelas:
- 6) Pendanaan yang Memadai:
- 7) Evaluasi dan Pengendalian:
- 8) Transparansi dan Akuntabilitas:

Dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan renja ini, diharapkan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan derajat masyarakat.

5.c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Kesehatan ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel. Rencana tindak lanjut pelaksanaan renja adalah memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai target. Tindak lanjut ini mencakup :

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja bertujuan mengevaluasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan.
2. Monitoring Pelaksanaan Renja bertujuan memantau secara berkala pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan untuk memastikan sesuai dengan rencana.
3. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut bertujuan mendokumentasikan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan Renja, serta menyusun rekomendasi tindak lanjut.
4. Perbaikan dan Penyesuaian bertujuan melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap rencana kerja jika ditemukan masalah atau ketidaksesuaian dengan target.

Dengan melakukan rencana tindak lanjut yang baik, diharapkan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Ponorogo, Agustus 2025

Kepala Dinas Kesehatan



Dyah Ayu Puspitaningarti, SKM.,M.Kes.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197602062002122012